



**REVISI RENCANA STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2016 - 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan

Revisi Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penyusunan Revisi Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan rencana dan program pembangunan daerah.

Dengan tersusunnya Revisi Renstra ini diharapkan selain menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, dapat menjadi landasan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencanan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas semua partisipasi dan kerjasamanya dalam penyusunan Revisi Renstra ini, sehingga Revisi Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dapat tersusun dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan.

Akhir kata semoga Dokumen Revisi Renstra ini bermanfaat bagi kita semua pihak dan kami menerima berbagai saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan ke arah kesempurnaan.

Semoga Revisi Rencana Strategis ini dapat menjadi langkah awal dan bukti keseriusan kami dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan di masa mendatang.

Purwodadi, 23 Maret 2019
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten. Grobogan

KARSONO,SH
NIP.19600502 198008 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkar Daerah	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	42
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	45
3.3. Telaah Renstra Kementerian Perindustrian dan Kementrian Perdagangan dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	52
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Willayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	62
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	69

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	70
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	79
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	75
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	85
BAB VIII	PENUTUP	99

DAFTAR TABEL :

1. **Gambar 2.2.1.1**
2. **Tabel 2.2.1.2**
3. **Tabel 2.2.1.3**
4. **Tabel 2.2.1.4**
5. **Tabel 2.2.1.5**
6. **Tabel 2.2.2.1**
7. **Tabel 2.3.1**
8. **Tabel 2.3.2**
9. **Tabel 2.3.3**
10. **Tabel 2.3.4**
11. **Tabel 2.3.5**
12. **Tabel 3.2.1**
13. **Tabel 4.1.1**
14. **Tabel 4.2.1**
15. **Tabel 5.1**
16. **Tabel 6.1**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan resmi OPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis segala usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis

Berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Setiap OPD akan menjabarkannya dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD dan menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Statejik ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

. Beberapa fungsi Rencana strategis ini antara lain : sebagai alat kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang maupun yang akan datang, dapat mengukur *outcome*/hasil yang harus dicapai, sebagai sarana untuk meminimalkan resiko dan mengoptimalkan hasil, menjadi media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan disusun melalui penyelarasan dengan berbagai dokumen perencanaan yang ada, utamanya dengan RPJMD Kabupaten Grobogan yang menempatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai penopang peningkatan pendapatan daerah khususnya kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB sektor perindustrian dan perdagangan. Renstra juga disusun dengan memperhatikan Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Kementerian Perdagangan, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah sehingga terwujud keterpaduan program yang saling memperkuat.

Secara umum Renstra OPD diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal mendasar, yaitu :

- 1) Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai OPD dalam lima tahun kedepan;
- 2) Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas. Pemerintah Kabupaten Grobogan menaruh perhatian yang sangat besar dalam pemberdayaan dan pembangunan Perindustrian dan Perdagangan. Hal

ini tertuang dalam kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam upaya mendorong ekonomi masyarakat dalam mencapai masyarakat Kabupaten Grobogan yang sejahtera secara utuh dan menyeluruh.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan,

sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang hendak dicapai.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kabupaten Grobogan 2016-2021.
- 2) Memberikan Landasan Kebijakan Strategi 5 (Lima) Tahunan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan yang terpadu, terarah dan terukur.
- 3) Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (renja) tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.
- 4) Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.
- 5) Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.
- 6) Menggambarkan tentang kondisi daerah saat ini dan mengarahkan untuk mendukung mewujudkan Visi dan Misi Bupati Grobogan.
- 7) Menjadi tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GANBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan OPD

Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 69 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

UPTD Pasar Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 69 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan. Kepala UPTD Pasar Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas di bidang Pasar Daerah sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan ditetapkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretarat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b) Sub Bagian Umum.
3. Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
 - a) Seksi Agro Industri;
 - b) Seksi Non Agro Industri, Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - c) Seksi Informasi Industri.
4. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - a) Seksi Distribusi, Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
 - b) Seksi Pengembangan, Promosi dan Sarana Perdagangan; dan
 - c) Seksi Bina Usaha dan Pemasaran
5. Bidang Pasar Daerah, membawahkan :
 - a) Seksi Retribusi Pasar;
 - b) Seksi Bina Pasar;
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar Daerah.
6. UPTD; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Uraian Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat dan Peraturan Bupati Grobogan No.69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.2.1. Tugas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan energy sumber daya mineral, perdagangan dan pasar daerah.

2.1.2.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah;
- b. Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah;
- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah;

- e. Pengelolaan Kesekretariatan dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang-Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Dinas melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah;
- b. Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah;
- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Sosial;

- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah;
- e. Pengelolaan Kesekretariatan dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dengan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administrative dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat-menyurat
- d. Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana,

perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan.

- e. Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan.
- f. Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub bagian Umum .

3. Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral

Kepala Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengembangan usaha industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Bidang Perindustria, Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan usaha industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengembangan usaha industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengembangan usaha industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM); dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral dibantu oleh Seksi Agro Industri, Seksi Non Agro Industri, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Seksi Informasi Industri.

4. Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi,

evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perdagangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Bidang Perdagangan melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perdagangan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perdagangan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perdagangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh Seksi Distribusi, Perlindungan Konsumen dan Metrologi, Seksi Pengembangan, Promosi dan Sarana Perdagangan, dan Seksi Bina Usaha dan Pemasaran.

5. Bidang Pasar Daerah

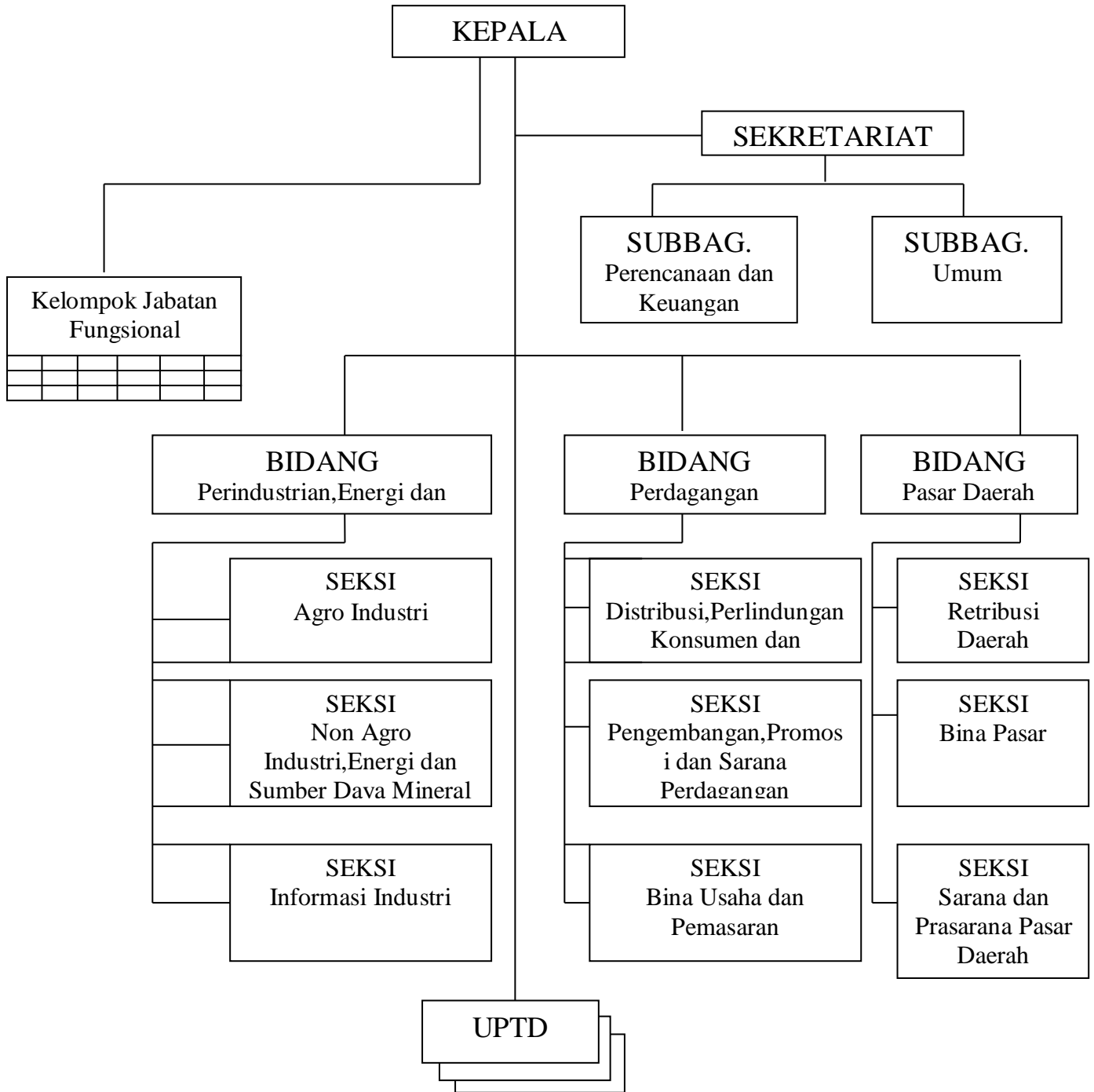
Kepala Bidang Pasar Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengelolaan pasar daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Bidang Pasar Daerah melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar daerah;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan pasar daerah;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan pasar daerah;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan pasar daerah;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan pasar daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Pasar Daerah dibantu oleh Seksi Restribusi Daerah, Seksi Bina Pasar, dan Seksi Sarana dan Prasarana Pasar Daerah.

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GROBOGAN**



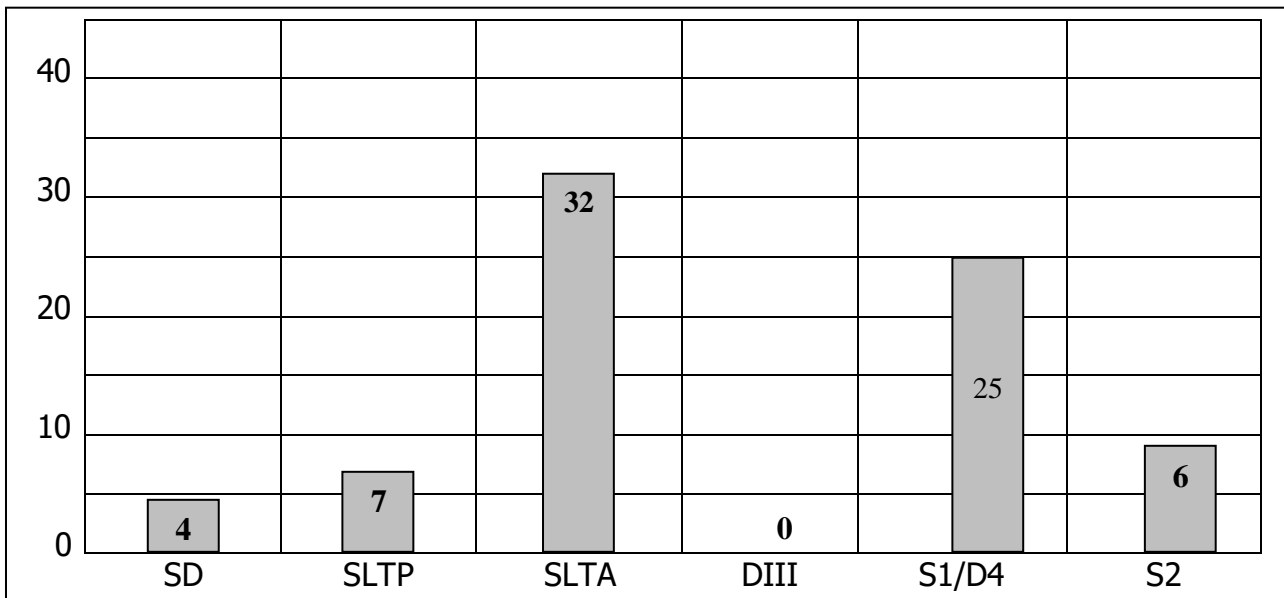
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan terdata sejumlah **74** pegawai negeri yang terdiri dari **57** pegawai laki-laki dan **17** pegawai perempuan.

Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan terekam pada diagram berikut

Gambar 2.2.1.1
Banyaknya Pegawai Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Grobogan Menurut Pendidikan
per 31 Desember Tahun 2017 (orang)



Jumlah aparatur yang terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan adalah sebanyak 74 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang gaji tahun 2017.

Tabel
2.2.1.2
Banyaknya Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Grobogan Menurut Golongan Ruang Gaji Tahun
2017

NO	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan I A	1 orang
	Golongan I B	0 orang
	Golongan I C	2 orang
	Golongan I D	1 orang
2	Golongan II A	8 orang
	Golongan II B	5 orang
	Golongan II C	21 orang
	Golongan II D	1 orang
3	Golongan III A	5 orang
	Golongan III B	6 orang
	Golongan III C	8 orang
	Golongan III D	11 orang
4	Golongan IV A	3 orang
	Golongan IV B	2 orang
	Golongan IV C	0 orang
	Golongan IV D	0 orang
Jumlah		74 orang

Bermodal SDM dengan kualifikasi dan kompetensi yang beragam, setiap personel memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mendukung akselerasi program pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.

**Tabel
2.2.1.3
Komposisi Data Pegawai tiap Bidang Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	Bidang	SD	SLTP	SLTA	D III	S1	S2	Jumlah
1	Sekretariat	0	1	5	0	5	1	12
2	Bidang Perindustrian	0	0	1	0	5	1	7
3	Bidang Perdagangan	0	1	2	0	0	1	4
4	Bidang Pasar Daerah	4	5	24	0	15	3	51
	Jumlah	4	7	32	0	25	6	74

Jumlah Jabatan Struktural, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan meliputi 1 eselon IIb/Kepala Dinas, 1 eselon IIIa/Sekretaris, 1 eselon IIIb/ Kepala-Kepala Bidang, 16 eselon IVa/Kepala-Kepala Sub Bagian/Seksi/UPTD Pasar, 7 eselon IVb/Kepala-Kepala Sub Bagian TU UPTD Pasar. 1 Jabatan Fungsional yaitu Penyuluh Industri, jumlah staf sebanyak 47 orang dan dibantu 181 orang Tenaga Harian Lepas yang terbagi dalam 7 orang tenaga Administrasi, 64 orang tenaga Keamanan, 109 orang tenaga Kebersihan, dan 1 orang sopir.

Tabel 2.2.1.4
Banyaknya Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Grobogan
Menurut Pangkat dan Esselon Tahun 2017

Esselon / Pangkat	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	Jabatan Fungsional	Jumlah
Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	-	0
Pembina Tk. I (IV/b)	1	1	-	-	-	-	2
Pembina (IV/a)	-	-	1	1	-	1	3
Penata Tingkat I (III/d)	-	-	-	11	-	-	11
Penata (III/c)	-	-	-	4	3	-	7
Penata Muda Tk I (III/b)	-	-	-	-	1	-	1
Penata Muda (III/a)	-	-	-	-	3	-	3
Jumlah	1	1	1	16	7	1	27

Tabel 2.2.1.5
Komposisi Tenaga Harian Lepas berdasarkan Kinerja

NO	Bidang	Administrasi/Simda	Keamanan	Kebersihan	Sopir	Jumlah
1	Sekretariat	3	3	5	1	12
2	Bidang Perindustrian	1	0	0	0	1
3	Bidang Perdagangan	3	0	0	0	3
4	Bidang Pasar Daerah	0	61	104	0	165

	Jumlah	7	64	109	1	181
--	--------	---	----	-----	---	-----

Komposisi pegawai dan pejabat struktural ditinjau menurut pendidikan, sebagian besar kompetensi dasar dan kompetensi bidangnya kurang memadai/tidak sesuai sehingga mengganggu kinerja sebab kebijakan teknis, perencanaan program dan kegiatannya tidak/ belum disusun berdasarkan Rencana Strategis yang ditetapkan secara profesional. Pegawai yang ditugaskan dalam jabatan struktural, sangat sulit dan jika berkemauan mempelajari tupoksinya dengan sungguh-sungguh, tetap membutuhkan waktu cukup lama dalam penyesuaian dirinya bisa melaksanakan jabatan secara optimal.

Kecuali itu, akibat dari struktur organisasi yang demikian besar maka mengakibatkan kekurangan staf dalam jumlah yang sangat besar, bahkan tidak memenuhi formasi yang dibutuhkan. Dibutuhkan formasi PNS akuntansi, sipil/ arsitektur, SKM/ Teknik Tata Lingkungan dan PPNS yang sekarang ini tidak ada sama sekali, agar capaian kinerjanya bisa optimal. Demikian juga dibutuhkan formasi PNS untuk jaga kantor dan pasar, tugas kebersihan kantor/pasar, sopir kendaraan dinas operasional dimana sekarang hanya ada 1 (satu) orang sopir, sehingga menyulitkan pelaksanaan tupoksi DINAS.

Diperlukan pembinaan dan pengembangan karier PNS yang standar dan baku dilakukan secara konsisten oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, utamanya bagi PNS yang terlalu lama menduduki jabatan struktural eselon IV/a dengan pangkat cukup tinggi untuk penyegaran dan peningkatan prestasi .

Mengingat jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal bila dibandingkan dengan beban kerja dan obyek yang ditangani, kedepan diusulkan jumlah pegawai yang ideal untuk lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.

2.2.2 Sumber Daya Asset / Modal

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan memiliki sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, bangunan pertokoan, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada Tabel 2.2.2.1

Tabel 2.2.2.1
Prasarana dan Sarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Grobogan Tahun 2016

No.	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN (PENGGHAPUSAN)
				BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah Rumah Dinah	Bidang	5	5	-	-	
2	Tanah Bangunan Pasar	Bidang	16	16	-	-	
3	Tanah Bangunan Pertokoan / Rumah Toko	Bidang	3	3	-	-	
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Bidang	4	4	-	-	

No.	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN (PENGGHAPUSAN)
				BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	
5	Tanah Lapangan Parkir	Bidang	1	1	-	-	
6	Station Wagon	Unit	4	4	-	-	
7	Truck + Attachment	Unit	2	2	-	-	
8	Sepeda	Unit	12	8	-	4	4
9	Gerobak Tarik	Unit	51	51	-	-	
10	Mesin Kompresor	Unit	1	1	-	-	
11	Mesin Bor	Unit	2	2	-	-	
12	Mesin Amplas	Unit	2	2	-	-	
13	Mesin Serut Kayu Profil	Unit	2	2	-	-	
14	Mesin Sunder / Penghalus Kayu	Unit	3	3	-	-	
15	Wood Working Thicknesser	Unit	1	1	-	-	
16	Wood Jointer	Unit	1	1	-	-	
17	Mesin Jahit Karung	Unit	2	2	-	-	
18	Tata Bebek	Unit	2	2	-	-	
19	Spraygun	Unit	6	6	-	-	
20	Palu Geologi	Unit	1	1	-	-	
21	Kompas Geologi	Unit	2	2	-	-	
22	Deep Meter AC Sounder GPS	Unit	2	2	-	-	
23	Alti Meter	Unit	2	2	-	-	
24	Deep Meter	Unit	1	1	-	-	
25	Thermometer Hygrometer	Unit	3	3	-	-	
26	Meter Air	Unit	46	46	-	-	
27	Alat Ukur Kadar Air Gabah	Unit	1	1	-	-	
28	Alat Ukur Kadar Air Jagung	Unit	1	1	-	-	
29	Timbangan	Unit	1	1	-	-	
30	Alat Penggilingan Padi (Mesin Rice Mill Unit)	Unit	1	1	-	-	
31	Alat Mie (Alat Mie Jagung)	Unit	1	1	-	-	
32	Mesin Drayer	Unit	1	1	-	-	
33	Mesin Drayer (Blower Seftifugal Drayer)	Unit	2	2	-	-	
34	Mesin Tepung Jagung	Unit	1	1	-	-	
35	Mesin Ketik	Unit	21	18	-	3	3
36	Mesin Ketik Elektronik	Unit	1	1	-	-	
37	Mesin Hitung Listrik	Unit	1	1	-	-	
38	Lemari Besi	Buah	10	-	10	-	10

No.	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN (PENGGHAPUSAN)
				BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	
39	Rak Besi	Buah	17	10	7	-	7
40	Rak Kayu	Buah	9	5	3	1	4
41	Filling Besi / Metal / Kabinet	Buah	13	7	6	-	6
42	Brankas	Buah	1	1	-	-	
43	Lemari Kaca	Buah	11	11	-	-	
44	Etalase Kaca	Buah	8	6	2	-	2
45	Rak Display	Buah	5	5	-	-	
46	Rak Obat	Buah	3	3	-	-	
47	Papan Nama Instansi	Buah	3	3	-	-	
48	Meja Gambar	Buah	1	1	-	-	
49	Papan Petunjuk / Slogan	Buah	6	2	-	4	4
50	Lemari Kayu	Buah	23	23	-	-	
51	Meja Kayu / Rotan / Meja Kerja Pertukangan Multi Guna	Buah	1	1	-	-	
52	Meja Kayu / Rotan	Buah	14	14	-	-	
53	Kursi Kayu / Rotan / Bambu	Buah	10	10	-	-	
54	Meja Rapat	Buah	5	5	-	-	
55	Meja Tulis	Buah	165	126	39	-	39
56	Meja Telephone	Buah	1	-	1	-	1
57	Kursi Rapat	Buah	10	10	-	-	
58	Kursi Tamu	Buah	2	1	1	-	1
59	Kursi Putar	Buah	3	-	3	-	3
60	Kursi Biasa / Kursi Kerja	Buah	138	95	43	-	43
61	Meja Biro / Meja Kerja	Buah	11	11	-	-	
62	Teralis Besi	Buah	10	10	-	-	
63	Mebelair Lain-Lain (Pallet Kayu)	Buah	84	84	-	-	
64	Lemari ES / Kulkas	Unit	2	2	-	-	
65	AC Split	Unit	15	15	-	-	
66	Televisi	Unit	3	3	-	-	
67	Unit Power Supply	Unit	13	12	-	1	1
68	Tangga Aluminium	Buah	2	2	-	-	
69	Pompa Air	Unit	3	3	-	-	
70	Alat Pemadam Kebakaran	Unit	59	59	-	-	
71	Personal Komputer Unit / PC	Unit	32	27	-	5	5
72	Lap Top	Unit	14	13	-	1	1
73	Note Book	Unit	11	11	-	-	
74	Monitor / LCD	Unit	2	2	-	-	

No.	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN (PENGGHAPUSAN)
				BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	
75	Printer	Unit	30	27	-	3	3
76	Modem	Unit	8	8	-	-	
77	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	1	-	-	
78	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	5	5	-	-	
79	Meja Kerja Pegawai Non Struktural / Meja Kerja	Buah	18	18	-	-	
80	Meja Rapat Pejabat Eselon III	Buah	2	2	-	-	
81	Meja Kursi Tamu	Buah	3	3	-	-	
82	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	1	-	-	
83	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Buah	5	5	-	-	
84	Kursi Kerja Pejabat eselon IV	Buah	37	37	-	-	
85	Kipas Angin	Unit	3	-	3	-	3
86	Kursi Lipat	Buah	40	-	40	-	40
87	Kursi Plastik	Buah	20	-	20	-	20
88	Kursi Rapat	Buah	25	25	-	-	
89	Proyektor / OHP	Unit	1	1	-	-	
90	Wireles Amplifier	Unit	1	1	-	-	
91	Camera Elektronik	Unit	7	7	-	-	
92	Lensa Camera	Unit	1	1	-	-	
93	Sound System	Unit	1	1	-	-	
94	Pesawat Telephone	Unit	1	1	-	-	
95	Mesin Facsimile	Unit	1	1	-	-	
96	Alat Komunikasi Radio HF / FM / HT	Unit	1	1	-	-	
97	Bangunan Gedung Permanen	Unit	7	6	-	1	1
98	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	3	3	-	-	
99	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen / Gedung Diklat	Unit	1	1	-	-	
100	Gedung Pertokoan / Koperasi Pasar Permanen	Unit	82	81	-	1	1
101	Gedung Pertokoan / Koperasi Pasar Darurat / Tenda PKL	Unit	11	11	-	-	
102	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-Lain	Unit	16	16	-	-	
103	Gedung Garasi / Pool Permanen	Unit	1	1	-	-	
104	Bangunan Gedung Pabrik Permanen / Bangunan Pabrik Minyak Jarak	Unit	1	1	-	-	
105	Bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya Permanen / Rumah Rice Mill	Unit	1	1	-	-	
106	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain / Pavingisasi Halaman Gedung SRG	Unit	1	1	-	-	
107	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain / Kanopy Los Basah Pasar Gubug	Unit	1	1	-	-	

No.	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN (PENGGHAPUSAN)
				BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	
108	Tempat Parkir	Unit	1	1	-	-	
109	Pagar	Unit	3	3	-	-	
110	Pintu Gerbang	Unit	4	4	-	-	
111	Landasan Kontainer	Unit	2	2	-	-	
112	Jalan Khusus Komplek	Unit	7	7	-	-	
113	Sumur Artesis	Unit	1	1	-	-	
114	Bangunan Pembuangan Air Hujan	Unit	10	10	-	-	
115	Instalasi Listrik Rumah / Gedung	Unit	9	9	-	-	
116	Jaringan Listrik Pasar Godong	Unit	1	1	-	-	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perekonomian Kabupaten Grobogan diukur antara lain berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku. secara makro diharapkan mampu berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kontribusi sektor Industri dan Perdagangan nilai PDRB Kabupaten Grobogan selama tahun 2011 - 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
TINGKAT CAPAIAN KINERJA

NO	IKK	Kondisi Awal	CAPAIAN KINERJA					
			Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Kebersihan	-	12,25%	12,250%	25 %	37,5 %	43,75%	47,06%

2	Pameran/expo	4 Kali	0 Kali	7 kali	6 kali	9 Kali	4 kali	6 kali
3	Pertambangan tanpa ijin	50%	98,25%	97,39%	41,74%	55,07%	53,92%	57,17
4	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	1.33%	1.50%	1.64%	1.71%	1,49%	1,21%	1,27
5	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	2,94%	3,37%	3.39%	3.45%	2.99%	2,7%	11,55
6	Pertumbuhan Industri	1,49 %	0.56%	0.51%	0,19%	0,95%	1,27%	0,93
7	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	18,11%	17.79%	18.13%	18.85%	19.30%	20,06%	19,41
8	Ekspor Bersih Perdagangan	0	0	875.000.000,-	1.953.000.000,-	1.552.000.000,-	142.032.319.000,-	214.608.485.100

Berdasarkan tabel diatas, untuk even-even pameran sangat minim dimana setiap tahunnya maksimal hanya mengikuti 9 kali pameran, bahkan untuk tahun 2011 tidak mengikuti pameran baik ditingkat nasional maupun regional karena pada tahun tersebut ploting anggaran untuk pameran/ expo tidak tersedia.

Nilai PDRB sektor industri pengolahan Kabupaten Grobogan mengalami kenaikan setiap tahunnya, terutama pada tahun 2013 tetapi pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan dan pada tahun 2016 kenaikannya sangat signifikan mencapai 8,85%.Laju pertumbuhan industri mengalami fluktuatif pada tahun 2015 hanya mengalami kenaikan 0,32% dan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,34%.Untuk mengatasi masalah Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Grobogan tidak hanya dilihat dari pertumbuhannya tetapi bagaimana kita mengembangkan industri Keci Menengah (IKM) yang sudah ada agar dapat menumbuhkan perekonomian

rakyat.

Pada sektor perdagangan menunjukkan kinerja yang positif hal ini dapat dilihat dari Kontribusi sektor perdagangan terhadap nilai PDRB Kabupaten Grobogan selama 6 tahun terakhir sejak tahun 2011-2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan nilai ekspor bersih perdagangan pada tahun 2016 melonjak sangat besar sampai Rp.**214.608.485.100,-** hal tersebut dipacu bertambahnya jumlah komoditi yang menempus pasar Internasional.

Pasar merupakan penopang peningkatan ekonomi rakyat, menghadapi hal tersebut dilihat dari indikator kebersihan pencapaiannya masih sangat rendah yaitu dibawah 50%. Hal tersebut dikarenakan kondisi sarana dan prasarana perdagangan yang ada di Kabupaten Grobogan masih sangat minim.

Nilai PDRB sektor Pertambangan Kabupaten Grobogan mengalami kenaikan setiap tahunnya tetapi pada 3(tiga) tahun terakhir mengalami penurunan.

Sejalan dengan semakin membaiknya perekonomian nasional, kinerja sektor industri dan perdagangan Kabupaten Grobogan telah mampu mendorong struktur ekonomi daerah. Besarnya kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap pembentukan PDRB tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari semakin membaiknya perkembangan sektor industri dan perdagangan di Kabupaten Grobogan dengan segala sumber daya pendukungnya termasuk keterkaitan dengan sektor-sektor produksi dan jasa serta peran aktif dunia usaha yang senantiasa responsive dan inovatif terhadap perubahan sebagai akibat berubahnya lingkungan strategis dan globalisasi perdagangan dunia, dukungan sarana dan prasarana penunjang komitmen kuat pemerintah yang berorientasi kepada dunia usaha (*pro*

bussines policy).

SIUP atau Surat Ijin Usaha Perdagangan adalah salah satu prasyarat untuk mendirikan suatu usaha. Semakin banyak orang yang mengajukan SIUP berarti semakin banyak orang yang terjun menjadi pengusaha. Menurut table 2.3.2 yaitu tabel **Banyaknya Perusahaan yang memiliki SIUP** pada tahun 2010-2016 menunjukkan bahwa perusahaan kecil yang mendominasi penerbitan SIUP.

Tabel 2.3.2
Banyaknya Perusahaan yang membuat
Surat Ijin Usaha Pedagangan (SIUP)
Tahun 2010 – 2016 di Kab Grobogan

NO	SIUP	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Perusahaan Besar	32	10	3	0	9	9	8
2	Perusahaan Menengah	101	39	67	26	33	38	50
3	Perusahaan Kecil	986	1.079	787	731	1.087	822	1.389
	Jumlah	1.119	1.128	857	757	1.129	869	1.447

Setiap usaha harus memiliki TDP atau Tanda Daftar Pengusaha. Hal ini sebagai bukti bahwa perusahaan/badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan. Di Kabupaten Grobogan Tanda Daftar Perusahaan terdiri dari berbagai bentuk, antara lain PT atau Perseroan Terbatas, Koperasi, CV, Firma (Fa), PO (Perorangan), dan bentuk usaha lainnya. Jumlah perkembangan perusahaan yang memiliki TDP mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Bentuk usaha yang paling banyak memiliki TDP adalah Perorangan

Tabel 2.3.3
Banyaknya Perusahaan yang memaftarkan
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tahun 2010 – 2016
di Kab Grobogan

NO	TDP	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	PT	26	16	18	26	20	28	31
2	Koperasi	13	15	1	8	6	15	2
3	CV	72	103	46	127	134	157	188
4	Fa	0	0	0	0	0	0	0
5	Peroran gan	1.013	1.112	664	954	984	906	623
6	Lainnya	0	0	0	0	26	3	2
	Jumlah	1.131	1.246	729	1.115	1.170	1.109	846

Pasar tradisional masih menjadi andalan masyarakat Kabupaten Grobogan untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Selain harganya lebih murah di bandingkan dengan di pasar/toko modern, belanja di pasar tradisional diunggulkan dengan sistem tawar-menawar yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Grobogan. Dilihat dari tabel 2.3.4 pasar tradisional masih mendominasi sarana-prasarana perdagangan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 sebesar 115 pasar, sedangkan pasar/toko modern berjumlah 56. Namun mulai tahun 2015 jumlah pasar/toko modern mengalami kenaikan dibandingkan dengan pasar tradisional.

Tabel 2.3.4
Perkembangan Jumlah Sarana Pasar di Kab.
Grobogan Tahun 2011– 2015

No	Pasar	Jumlah					2016
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pasar Desa	99	99	99	99	99	99
2	Pasar Daerah	13	13	13	13	13	13
3	Pasar Hewan	3	3	3	3	3	3
4	Pasar Modern	1	1	1	1	1	1
5	Toko Modern	0	0	0	0	42	55

Tabel 2.3.5
Realisasi Capaian Target RPJMD terhadap sektor Perindustrian dan Perdagangan

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2010	Target Capaian Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke						Rasio (%) Capaian Tahun Ke					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Urusan Perindustrian																			
1	Nilai produksi industri besar/ sedang (ribu rupiah)	306,658,360	310,954,577	315,304,899	319,719,168	324,195,236	328,733,969	328,855,435	310,954,577	315,304,899	405,250,000	471,700,000	485,993,939	432,733,969	100	100	126,75	145,50	147,84	131,59
2	Nilai produksi industri kecil (ribu rupiah)	141,603,118	157,292,743	174,720,779	194,079,840	215,583,888	239,470,583	240,540,654	157,292,743	174,720,779	254,620,000	257,046,000	415,956,000	418,282,583	100	100	131,19	119,23	173,70	173,89
3	Nilai produksi industri rumah tangga (ribu rupiah)	344,412,515	360,703,227	377,764,490	395,632,750	414,346,179	433,944,754	454,865,336	360,703,227	377,764,490	415,860,660	427,500,000	428,752,563	433,944,754	100	100	105,11	103,17	98,80	95,4
4	Persentase industri yang telah menggunakan teknologi dalam proses produksi (%)	43,33	48,66	53,99	59,32	64,65	70,00	70,00	48,66	53,99	50,00	50,60	62,00	70	100	100	84,29	78,27	88,57	100
5	Persentase industri yang telah memiliki izin usaha	50	55	60	65	70	75	80	55	60	50	50,6	57	100	100	100	76,92	72,29	76	125
6	Jumlah cluster industri yang telah berkembang (buah)	5	6	6	7	7	8	8	6	6	6	7	8	8	100	100	85,71	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2010	Target Capaian Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke						Rasio (%) Capaian Tahun Ke					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
7	Jumlah sentra industri yang telah berkembang (buah)	22	22	23	23	24	24	24	22	23	166	221	229	321	100	100	721,74	920,83	954,17	1.300
	Urusan Perdagangan																			
1	Jumlah kasus peredaran barang ilegal dan tidak memenuhi standar	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	3	3	0	0	0	0	0	0
2	Nilai ekspor (Rp)	33.124.122.000,-	34.780.329.000,-	40.577.050.000,-	46.866.490.000,-	58.157.060.000,-	67.171.404.300,-	64.514.565.000,-	0	87,500.000,-	1.953.000.000,-	1.552.000.000,-	142.032.319.000,-	214.608.485.100	0-	0,22	4,17	2,67	211	332,65
3	Jumlah pasar tradisional kondisi baik	8	9	10	11	12	13	13	3	3	4	6	7	8	33,33	30	36,36	50	53,85	61,54
4	Persentase lokasi pedagang kaki lima yang tertata	100	29	29	29	29	29	29	2	2	3	3	3	4	6,90	6,90	10,34	10,34	10,34	13,79
	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral																			
1	Persentase lokasi penambangan yang masih dalam kondisi baik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	70	59,65	70	78,32	100	100	70	59,65	70	76,32
2	Jumlah Penambangan Tanpa	255	242	230	218	207	197	158	238	224	91	114	106	114	98,35	97,39	41,74	55,07	53,92	72,15

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2010	Target Capaian Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke						Rasio (%) Capaian Tahun Ke					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ijin (PETI)																			
3	Persentase rumah yang menggunakan listrik (%)	71	73	75	77	79	80	80	44	47	44,5	58,62	67,94	89,25	60	63	57,79	74,20	84,92	115,56
4	Jumlah perusahaan memiliki SIPD	12	14	16	18	20	22	23	8	14	14	9	6	15	57,14	87,5	77,78	45	27,27	65,22
5	Ketersediaan daya listrik/ daya listrik terpasang (Mwatt)	58	61	64	67	70	73	75	33,7	37,5	41,8	50,3	60,0	287	55,3	58,6	62,4	71,8	82,2	382,67
6	Jumlah kebutuhan listrik (Mwatt)	9	10	11	12	13	14	15	7	8	9	11	12	356	70	72,73	75	84,6	85,7	2.373,3
7	Persentase rumah yang menggunakan listrik (%)	73	73	75	77	79	80	80	43,8	47,25	44,5	58,62	67,94	89,25	60	63	57,79	74,20	84,92	115,56

Dari tabel 2.3.5 Dapat dilihat bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target RPJMD, bahkan ada beberapa realisasi yang melampaui target yang sudah ditentukan. Sektor industri masih menjadi penyumbang ekonomi terbesar bagi Kabupaten Grobogan. Sama halnya dengan sektor perdagangan, realisasi sektor industri mengalami beberapa kenaikan dari target yang telah ditentukan. Kondisi tahun 2016 untuk nilai produksi industri besar/ sedang dapat memproduksi barang dengan nilai Rp. **432.733.969,-** selisih Rp14.451.386,- dari industri kecil . Persentase industry yang telah menggunakan teknologi dalam proses produksinya telah mencapai target yang diharapkan sebesar 100%. Untuk cluster industry yang telah berkembang telah mencapai target sebanyak 8 cluster dan sentra industry yang telah berkembang atau 100%. Tidak semua target bisa direalisasikan, nilai produksi industry rumah tangga belum mencapai target yaitu baru Rp. **433.944.754,-** dari target sebesar Rp. **454.865.336,-** dan persentase industry yang telah memiliki ijin usaha melebihi 25% dari target yang ditentukan.

Peran Sektor perdagangan semakin penting dalam perekonomian masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi sektor PDRB Sektor perdagangan. Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian realisasi kinerja sector perdagangan telah mencapai target bahkan ada beberapa realisasi yang melampaui target yang sudah ditentukan, hal tersebut dapat dilihat dari nilai realisasi ekspor sebesar Rp. **214.608.485.100,-** dari target Rp. **64.514.565.000,-**

Pada sector Pertambangan persentase lokasi penambangan yang masih dalam kondisi baik, belum mencapai target yaitu baru 76,32% dari target 100%, begitu juga dengan perusahaan yang telah memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) baru mencapai 15 perusahaan dari target yang ditentukan sebesar 23

perusahaan. Tetapi untuk jumlah Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) menunjukkan kinerja yang perlu menjadi perhatian, dimana pencapaian tiap tahunnya semakin berkurang tetapi mulai tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami fluktuasi mencapai 72,15% dengan kata lain jumlah penambang tanpa ijin semakin bertambah hal ini menunjukkan indicator yang kurang baik. Ketersediaan daya listrik/ daya listrik terpasang, jumlah kebutuhan listrik dan persentase rumah yang menggunakan listrik telah mencapai target.

Tabel 2.3.6
Pagu Anggaran dan Realisasi APBD
Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kab.Grobogan
Tahun 2012-2016

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	17	18	18	19	20	
	Pendapatan	2,546,953,565	2,791,743,360	3,075,397,249	3,159,337,940	2,521,514,664	2,659,603,124	1,986,006,682,244,613,160	2,800,960,320	2,690,217,670	2,783,178,888	2,796,677,558	77.98	80.40	91.08	85.15	110.38	105.15	16,754,549,902	12,504,976,724	
	Belanja Tidak Langsung	4,112,797,492	4,762,637,471	5,038,764,192	5,242,448,972	5,709,336,294	6,165,201,653	4,105,146,724,544,356,823	4,918,843,377	5,054,180,152	5,568,736,741	5,765,097,030	99.81	95.42	97.62	96.41	97.54	93.51	31,031,186,074	24,191,263,822	
	Belanja Langsung	2,299,533,000	2,610,000,000	5,156,390,000	4,830,210,000	12,183,302,000	22,658,285,000	2,175,284,972,434,159,391	4,857,706,473	4,589,057,414	10,928,201,865	22,002,500,141	94.60	93.26	94.21	95.01	89.70	97.11	49,737,720,000	24,984,410,122	
	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral																				
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	-	100,000,000	85,000,000	50,000,000	50,000,000	30,000,000	-	88,686,000	84,650,000	49,820,000	49,882,000	29,260,750	0.00	88.69	99.59	99.64	99.76	97.54	315,000,000	302,298,750
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Air Tanah	-	90,000,000	50,000,000	120,000,000	-	-	-	89,392,000	49,600,000	118,915,000	-	-	0.00	99.32	99.20	99.10	0.00	0.00	260,000,000	257,907,000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	18,990,000	-	-	-	0.00	0.00	94.95	0.00	0.00	0.00	20,000,000	18,990,000
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Potensi dan Teknologi Geologi	-	-	-	-	110,000,000	130,000,000	-	-	-	-	108,837,000	127,128,000	0.00	0.00	0.00	0.00	98.94	97.79	240,000,000	235,965,000
	Program Peningkatan Pelayanan Usaha Pertambangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	Program Pengembangan dan Pembinaan Bidang Migas	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	19,800,000	-	-	-	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000	19,800,000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi	-	-	20,000,000	65,000,000	-	-	-	-	19,800,000	63,738,500	-	-	0.00	0.00	99.00	98.06	0.00	0.00	85,000,000	83,538,500
	Program Pembinaan dan	-	-	-	-	190,000,000	215,000,000	-	-	19,800,000	63,738,500	187,652,000	211,841,100	0.00	0.00	0.00	0.00	98.76	98.53	405,000,000	483,031,600

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	17	18	19	20		
	Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Migas																				
	Urusan Perdagangan																				
	Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan	-	-	20,000,000	130,000,000	170,000,000	245,000,000	-	-	19,246,000	86,578,000	155,766,000	217,799,250	0.00	0.00	96.23	66.60	91.63	88.90	565,000,000	479,389,250
	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	Program Peningkatan dan pengembangan ekspor	-	-	107,000,000	100,000,000	-	-	-	-	102,876,500	75,023,400	-	-	0.00	0.00	96.15	75.02	0.00	0.00	207,000,000	177,899,900
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	333,355,000	333,355,000	190,000,000	1,653,320,000	896,000,000	17,320,485,000	325,958,900	325,958,900	188,987,000	1,603,838,000	835,111,000	16,869,795,768	97.78	97.78	99.47	97.01	93.20	97.40	27,931,162,000	26,509,967,118
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pendirian Pasar / Toko Modern	-	-	85,000,000	-	-	-	-	-	78,562,500	-	-	-	0.00	0.00	92.43	0.00	0.00	0.00	85,000,000	78,562,500
	Program Pelayanan Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	457,562,500	-	-	-	-	-	453,040,000	-	-	-	0.00	0.00	99.01	0.00	0.00	0.00	457,562,500	453,040,000
	Program Penyediaan Jasa Kinerja Pasar Daerah	-	-	280,000,000	-	-	-	-	-	278,203,300	-	-	-	0.00	0.00	99.36	0.00	0.00	0.00	280,000,000	278,203,300
	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	-	-	-	-	-	40,000,000	-	-	-	-	-	32,086,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.22	60,000,000	52,086,000
	Program Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar	-	-	25,000,000	20,000,000	25,000,000	40,000,000	-	-	24,756,000	18,925,000	24,838,000	39,517,500	0.00	0.00	99.02	94.63	99.35	98.79	150,000,000	147,699,100
	Urusan Perindustrian																				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,004,033,000	1,004,033,000	721,865,000	1,654,520,000	1,892,100,000	2,007,800,000	952,300,405	952,300,405	602,763,109	1,546,751,404	1,809,851,963	1,985,109,192	94.85	94.85	83.50	93.49	95.65	98.87	9,255,618,000	8,785,116,903
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	375,645,000	375,645,000	186,535,000	343,550,000	710,110,000	1,067,000,000	317,307,866	317,307,866	183,797,564	273,102,083	695,218,093	1,040,675,789	84.47	84.47	98.53	79.49	97.90	97.53	3,529,840,000	3,346,531,674
	Program Peningkatan	-	-	-	43,000,000	80,000,000	91,000,000	-	-	-	42,035,000	79,870,000	90,295,500	0.00	0.00	0.00	97.76	99.84	99.23	332,000,000	329,135,500

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	17	18	19	20		
	Disiplin Aparatur																				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	66,500,000	66,500,000	30,000,000	20,000,000	30,000,000	257,000,000	65,000,000	65,000,000	8,995,000	10,756,000	24,450,000	249,325,000	97.74	97.74	29.98	53.78	81.50	97.01	418,500,000	371,636,000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20,000,000	20,000,000	32,600,000	30,000,000	35,000,000	95,000,000	19,992,800	19,992,800	31,810,176	29,163,836	33,707,308	93,416,592	99.96	99.96	97.58	97.21	96.31	98.33	267,600,000	261,552,184
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	-	-	113,187,500	200,000,000	-	-	-	-	110,007,500	196,211,500	-	-	0.00	0.00	97.19	98.11	0.00	0.00	313,187,500	306,219,000
	Program Pengembangan IK & M	350,000,000	350,000,000	50,000,000	890,000,000	415,000,000	1,068,000,000	346,586,000	346,586,000	49,860,000	841,761,150	411,341,550	965,467,700	99.02	99.02	99.72	94.58	99.12	90.40	3,698,000,000	3,261,767,134
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	150,000,000	150,000,000	-	-	60,000,000	-	148,139,000	148,139,000	-	-	-	59,904,700	98.76	98.76	0.00	0.00	99.84	0.00	290,000,000	285,258,200
	Program Pengembangan Industri Agro Dan Kimia	-	-	125,000,000	-	-	-	-	-	122,150,000	-	-	-	0.00	0.00	97.72	0.00	0.00	0.00	125,000,000	122,150,000
	Program Pengembangan Industri Tekstil Produk Tekstil	-	-	123,250,000	-	-	-	-	-	123,149,250	-	-	-	0.00	0.00	99.92	0.00	0.00	0.00	123,250,000	123,149,250
	Program Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial	-	-	-	-	87,000,000	52,000,000	-	-	-	-	-	86,945,500	0.00	0.00	0.00	0.00	99.94	97.66	189,000,000	185,610,500
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	-	-	-	-	135,000,000	-	-	-	-	-	-	133,744,400	0.00	0.00	0.00	0.00	99.07	0.00	135,000,000	133,744,400

Pagu anggaran dan realisasi APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan selama tahun 2011 hingga tahun 2016 menunjukkan angka yang fluktuatif. Terjadi penurunan pagu anggaran belanja langsung di tahun 2014. Dapat dilihat di Tabel 2.3.6, pagu anggaran belanja langsung APBD turun sebesar Rp 326.180.000,- di tahun 2014 dan capaian realisasi belanja langsung APBD terkecil pada tahun 2015 sebesar Rp **10,928,201,865,-** atau 89,70%.

Penerimaan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi. Penerimaan asli daerah merupakan salah satu pilar kemandirian daerah. Penerimaan Asli Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan enam tahun terakhir mengalami fluktuatif artinya pada tahun 2011 sampai 2014 belum bisa mencapai target yang diharapkan. Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) melebihi target di tahun 2015 (110,38 %) dan 2016 (105,15%). PAD tersebut yang nantinya digunakan untuk pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan secara menyeluruh.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang perindustrian dan perdagangan Kabupaten Grobogan.

Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya.

Melihat kontribusi di sektor industri dan perdagangan baik dalam hal PDRB, pendapatan per kapita maupun jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor tersebut dalam lima tahun terakhir, kami melihat bahwa sektor tersebut masih dapat ditingkatkan kontribusinya dalam mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan.

Berikut ini adalah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan selama lima tahun kedepan adalah:

2.4.1. Tantangan

Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

- Perdagangan bebas, khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi tantangan bagi Industri kecil dan menengah meningkatkan kualitas produk, sehingga mampu berdaya saing.
- Persaingan produk industri dengan daerah lain yang memiliki jenis produk yang sama, menjadi tantangan bagi Industri kecil dan menengah dalam meningkatkan kualitas produk, sehingga mampu berdaya saing.
- Beredarnya produk-produk illegal dipasaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku / memenuhi standart.
- Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pasar tradisional.
- Perusahaan berskala besar belum dapat menyerap tenaga kerja yang maksimal

2.4.2. Peluang

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari potensi/kemampuan. Peluang yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut

- Tersedianya potensi usaha/ potensi bahan galian unggulan, yaitu : batu gamping, tanah liat, fosfat dan sirtu.
- Semakin meningkatnya masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan.
- Pangsa pasar yang semakin terbuka.
- Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
- Adanya perkembangan teknologi dan informasi serta peran dan fungsi pelaku dunia usaha perdagangan.
- Dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan nilai dan komoditi ekspor ke luar negeri.
- Adanya perkembangan teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan sektor industri dalam arti luas Industri Kecil (IK), Industri Pangan (IP), Industri Kecil Menengah (IKM), Agro Industri (AI) dan Non Agro Industri (NAI) di Kabupaten Grobogan agar menjadi andalan kedua setelah pertanian.
- Adanya pembinaan manajemen usaha, pengembangan SDM tenaga kerja industri, pengembangan sentra dan klaster, serta peningkatan peran dan fungsi asosiasi industri.
- Regulasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur penataan pasar daerah.
- Adanya peluang dalam peningkatan sarana dan prasarana pasar sesuai dengan program prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Grobogan, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi Bupati Grobogan tahun 2016-2021.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021).

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tuntutan pelayanan yang terus terjadi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terlihat adanya isu strategis yang diperkirakan akan menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan di masa depan. Setelah dicermati secara seksama atas pelaksanaan tugas, dipandang perlu untuk menyusun langkah-langkah konkrit dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut. Guna mewujudkan optimalisasi tersebut, dipilih beberapa isu strategis yang menjadi tuntutan tugas bagi Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan tugas pelayanannya, yaitu :

1. Sekretariat

- Rendahnya SDM aparatur secara kuantitas maupun kualitas
- Kurangnya sarana prasarana perkantoran

2. Bidang Perindustrian

- Masih sedikitnya jumlah industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi (SNI, ISO dan lain), masih terdapat 26,5% industri yang belum berstandar kelayakan produksi.
- Masih rendahnya klaster industri yang berkembang, jumlah klaster yang berkembang baru mencapai 7 unit.
- Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar.
- Belum optimalnya pengembangan Industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri.

- Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana prasarana layanan teknis dan mesin.
- Belum meratanya kapasitas dan ketrampilan SDM industri kecil terkait dengan penguasaan teknologi industri.
- Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku lokal.
- Masih banyaknya industri kecil dan menengah yang belum memiliki ijin usaha. Jumlah industri yang memiliki ijin usaha baru mencapai 50,6%.
- Belum seluruh rumah tangga memperoleh pelayanan listrik tahun 2015 baru sebesar 84,92%
- Masih tingginya pertambangan yang tidak memiliki izin, tahun 2015 sebesar 53,92%.

3. Bidang Perdagangan

- Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan produk makanan yang telah kadaluwarsa.
- Masih terbatasnya volume dan nilai realisasi ekspor. Hal ini disebabkan lemahnya daya saing produk dalam hal mutu, desain dan merk dagang produk lokal, dan belum kuatnya jaringan eksportir.
- Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau di seluruh wilayah, dan belum terintegrasinya pasar lokal.
- Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan jalan raya dan fasilitas umum lainnya, pada tahun 2015 rasio peningkatan pedagang kaki lima sebesar 10,34 %. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran pedagang kaki lima dan kurang tertatanya kawasan pedagang kaki lima.

- Munculnya masalah sosial sebagai akibat dari banyaknya pasar swalayan/pasar modern, dan keberadaan pasar tradisional dan toko kelontong yang sudah ada kurang mendapat perlindungan. Pada tahun 2015 jumlah pasar modern ada 42 buah dan ini dipastikan akan bertambah seiring dengan perekonomian yang semakin maju.
- Tingginya biaya ekonomi sebagai akibat dari masih rendahnya infrastruktur penunjang yang telah menyebabkan turunnya daya saing produk.
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan.
- Berlakunya AFTA 2010 yang mempengaruhi persaingan produk-produk perdagangan antar Negara.

4. Bidang Pasar Daerah

- Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional. ini dibuktikan pada tahun 2015 rasio jumlah pasar tradisionalkondisi baik baru berkisar diangka 53,85 %.
- Belum optimalnya tingkat pengelolaan pasar tradisional.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan yang terkait dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, perlu dilakukan telaah terhadap visi, misi dan program tersebut. Adapun visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Terpilih adalah sebagai berikut :

***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera
Secara Utuh dan Menyeluruh"***

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Grobogan dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka maksud dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang sejahtera secara utuh, mengandung maksud bahwa tercipta kondisi masyarakat di Kabupaten yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil. Artinya masyarakat Kabupaten Grobogan dapat terpenuhi sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, memiliki usia harapan hidup yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki pendapatan perkapita yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Selain terpenuhinya kebutuhan secara materiil, masyarakat merasa aman dalam menjalani kehidupannya, terhindar dari ancaman keamanan dan ketertiban lingkungan.
2. Masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, mengandung maksud bahwa kondisi masyarakat Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah kabupaten. Ditandani dengan menurunnya tingkat kesenjangan kelompok pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang merata dan menurunnya kesenjangan antar wilayah.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk

memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam rangka pencapaian visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh”, yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki , maka ditetapkan 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

- Misi 1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air.
- Misi 2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.
- Misi 3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata.
- Misi 4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat , keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya.
- Misi 5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
- Misi 6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik.
- Misi 7. Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang.
- Misi 8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat.
- Misi 9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan.

Dari penjabaran visi dan misi di atas, misi ke3 (tiga) yaitu **“Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri,**

perdagangan, koperasi dan pariwisata”, merupakan visi yang dipakai sebagai amanat untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan karena di dalam misi tersebut menyangkut isu strategis yang dihadapi oleh Disperindag

.Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH

Visi dan Misi	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
<p>Visi</p> <p>- Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh”,</p> <p>Misi</p> <p>- Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata</p>	<p>- Masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dalam melakukan pengawasan dan penilaian</p> <p>- Kurangnya SDM dalam rangka meningkatkan ketrampilan UMKM.</p>	<p>- Perindustrian dan perdagangan merupakan prioritas pembangunan</p> <p>- Telah tersedianya sarana prasarana dalam pengembangan perdagangan dan Industri</p>
<p>Tujuan</p> <p>- Menumbuh kembangkan usaha ekonomi kerakyatan baik industri maupun perdagangan.</p> <p>Sasaran</p> <p>- Meningkatkan jumlah dan kapasitas Industri Kecil</p>	<p>- Kurangnya SDM aparatur secara kuantitas maupun kualitas dan sarana prasarana perkantoran</p> <p>- Belum optimalnya jejaring kemitraan</p>	<p>- Pembinaan dan pengawasan minerba.</p>

<p>Menengah (IKM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta kinerja sektor perdagangan 	<p>usaha antara IKM dengan industri besar dan pemanfaatan bahan baku local, serta</p>	
	<p>pengembangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri belum sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri - Rendahnya kapasitas dan ketrampilan SDM industri kecil terkait dengan penguasaan teknologi industry, tingkat pertumbuhan IKM dan kualitas produk IKM. - Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana prasarana layanan 	
	<p>teknis dan mesin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya penataan kawasan industry dan sistem informasi industri 	

	<p>nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien serta sarana perdagangan belum sesuai dengan ketentuan. - Adanya produk barang dan jasa beredar yang tidak memenuhi standar mutu dan kualitas kesehatan serta masih ditemukannya alat ukur atau timbang yang belum di tera dan ditera ulang dan perlindungan konsumen belum optimal - Terbatasnya produk 	
--	--	--

	<p>lokal yang diterima di pasar dalam negeri dan luar negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya tingkat pengelolaan 	
	<p>pasar tradisional/modern, ijin usaha toko swalayan serta penataan PKL dan Asongan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional. - Belum optimalnya pengelolaan sumber daya mineral terkait pertambangan, pengelolaan potensi mineral dan migas oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Grobogan - Masih terdapatnya usaha pertambangan tanpa izin (PETI) yang bersifat eksploitatif dan merusak kelestarian 	

	<p>lingkungan dan sumber mata air alami</p> <p>- Belum akuratnya data potensi geologi dan belum adanya data mitigasi bencana geologi, sarana dan prasarana, serta pengawasan mitigasi bencana geologi</p>	
--	---	--

3.3. Telaah Renstra Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan

Visi Pembangunan Industri tahun 2015 – 2019 adalah: ***“Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam dan Berkeadilan”***

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi.
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing.

Untuk menjembatani visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2015 – 2019 dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas.
3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik disektor perdagangan.

Tujuan dan Sasaran	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
<p>Tujuan:</p> <p>Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing. <p>Perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengamanan perdagangan, penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri, kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting, perlindungan konsumen, iklim usaha dan kepastian berusaha, kualitas kinerja organisasi, dukungan kinerja perdagangan. - Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri. - Optimalisasi / penguatan pasar 	<p>Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan daya saing produk industri lemah dalam menghadapi persaingan. - Lambannya birokrasi, kualitas SDM aparatur, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait - Terbatasan ketersediaan infrastruktur dan lahan industri. <p>Perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fluktuasi harga bahan pokok 	<p>Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinamika sector Industri - Peluang bagi industri nasional untuk memperluas pasar bagi produk-produk industri nasional - Kebijakan Otonomi Daerah <p>Perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potensi Pasar Domestik - Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi - Iklim usaha perdagangan

<p>berjangka komoditi, SRG dan Pasar lelang</p> <p>Sasaran: Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya peran industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang/jasa - Belum tersedianya data dan informasi yang berkualitas - Belum sinerginya kebijakan pusat dan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Peran Indonesia di dunia Internasional - Ritel modern dan tradisional - Pasar komodite yang terorganisir - Komodite unggulan yang beragam - Kualitas SDM sector perdagangan
<p>dalam perekonomian nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri - Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional - Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi - Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri - Menguatnya struktur industri - Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standardisasi industri - Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri - Meningkatnya kualitas pelayanan dan informasi public - Meningkatnya ketahanan industri melalui pemberian 		

<p>fasilitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri untuk mendukung pertumbuhan industri nasional - Tumbuhnya industri strategis berbasis sumber daya alam 		
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kompetensi tenaga kerja industri melalui pendidikan dan pelatihan - Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui penyelenggaraan sistem informasi industri nasional <p>Perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pengamanan perdagangan dan Kebijakan Nasional - Meningkatnya diversifikasi Pasar dan Produk Eksport - Meningkatnya pertumbuhan PDB sector perdagangan - Meningkatnya konsumsi Rumah Tangga Nasional terhadap produk dalam negeri dan/ atau menurunnya import 		

<p>barang konsumsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi, SRG, dan Pasar lelang - Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar 		
<p>daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting - Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan Barang/jasa - Meningkatnya pelayanan dan kemudahan berusaha 		

3.3.2. Telaah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yaitu ***“Terwujudnya Kemandirian Industri Dan Perdagangan Yang Berdaya Saing Global Berbasis Ekonomi Kerakyatan”*** memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi

yang akan dicapai pada masa yang akan datang diharapkan.

1. Kemandirian Industri;

Pembangunan daerah di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Dengan demikian, Kemandirian industri adalah Industri yang menggunakan kekuatan dan sumber daya lokal secara optimal dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan dampak terhadap lingkungan (industri hijau). Kemandirian industri diwujudkan sebagai upaya untuk membangun industri Jawa Tengah yang maju melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien serta mendorong tumbuhnya industri di seluruh wilayah Jawa Tengah dengan tetap memperhatikan potensi lokal masing-masing.

Kemandirian industri adalah salah satu komponen dan kunci utama dalam pencapaian target pembangunan di Jawa Tengah. Melalui penguatan kompetensi inti di masing-masing daerah, kemandirian industri harus diarahkan pada penciptaan produk yang memiliki daya saing global dengan tetap menjangkau

dan mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

2. Kemandirian Perdagangan;

Pengelolaan sektor perdagangan yang menyeluruh dan terpadu berprinsip pada keberlanjutan, transparansi, dan berkeadilan sangat penting untuk peningkatan pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Kemandirian perdagangan berkorelasi dengan kemandirian industri yang diartikan bahwa produk-produk yang diperdagangkan dalam negeri juga semaksimal mungkin diproduksi dalam negeri. Perekonomian daerah tidak saja ditopang oleh kegiatan konsumsi, tetapi juga oleh kegiatan produksi.

Kebijakan dalam menciptakan kemandirian perdagangan harus mendorong produksi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam negeri dan melindungi hasil produksinya demi memenuhi kebutuhan daerah. Kemandirian perdagangan juga berhubungan dengan upaya-upaya sistematis dalam meningkatkan penggunaan produk- produk dalam negeri melalui promosi, sosialisasi, atau pemasaran dan perluasan akses pasar bagi produk dalam negeri, serta menerapkan kewajiban menggunakan produk dalam negeri. Tujuannya adalah untuk menekan laju impor di satu sisi dan meningkatnya ekspor di sisi lain. Sengitnya persaingan dalam perdagangan saat ini menyadarkan betapa pentingnya membangun kekuatan pasar dalam negeri, dengan memperkuat dan menyerap hasil produk industri lokal.

Untuk mencapai visi di atas, agar dapat terlaksana dan berhasil dengan baik diperlukan upaya nyata dalam bentuk misi

sebagai berikut:

a. Mengembangkan industri berbasis unggulan daerah.

Pengembangan industri merupakan amanat pembangunan nasional sebagai bagian untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan tidak hanya di sektor industri saja, tetapi sekaligus juga harus mampu turut mengatasi permasalahan daerah. Untuk itu, pengembangan industri berbasis unggulan daerah diarahkan untuk memperkuat daya saing produk industri yang efektif, tangguh, dan efisien dengan menumbuhkan klaster-klaster industri prioritas dan membangun kompetensi inti industri daerah di kabupaten/kota. Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri di Jawa Tengah, dibutuhkan kekuatan struktur industri dari hulu sampai hilir serta berorientasi pasar global.

b. Meningkatkan ekspor non migas dan pengamanan perdagangan dalam negeri.

Upaya untuk mengembangkan industri berorientasi sektoral harus dibarengi dengan upaya-upaya peningkatan ekspor ke mancanegara. Peningkatan ekspor non migas dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas barang orientasi ekspor dan juga pembinaan bagi para eksportir. Dalam rangka mendukung program peningkatan dan pengembangan ekspor dilakukan penyusunan panduan komoditas ekspor yang mengatur 4 komoditas Jawa Tengah, validasi eksportir, evaluasi statistik ekspor dan publikasi kinerja ekspor setiap caturwulan. Untuk itu, peningkatan ekspor non migas dan pengamanan

perdagangan dalam negeri merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan iklim investasi sektor industri di Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan dan Sasaran	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
Visi - Terwujudnya Kemandirian Industri Dan Perdagangan Yang Berdaya Saing Global Berbasis Ekonomi Kerakyatan Misi - Mengembangkan industri berbasis unggulan daerah. - Meningkatkan ekspor non migas dan pengamanan perdagangan dalam negeri. Tujuan - Meningkatnya Kontribusi sektor industri dalam perekonomian - Meningkatkan pertumbuhan ekspor dan pengendalian impor - Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan	- Pengaruh globalisasi; - Terbukanya akses pasar produk berbagai negara dengan adanya perdagangan bebas - Semakin pesatnya perkembangan pusat-pusat perdagangan di Kota yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah - Meningkatnya produk yang masuk ke Provinsi Jawa Tengah dengan kualitas teknologi yang lebih baik dibandingkan produk local - Tersedianya banyak produk yang berkualitas dengan harga yang	- Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah - Meningkatnya akses pasar ekspor dengan tingkat tariff yang lebih rendah bagi produk- produk Provinsi Jawa Tengah - Tersedianya potensi usaha - Semakin meningkatnya masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan - Pangsa pasar yang

<p>pasar dalam negeri</p> <p>Sasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 	<p>kompetitif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingginya tingkat persaingan usaha 	<p>semakin terbuka</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbukanya lapangan kerja
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Pertumbuhan Industri - Meningkatnya nilai ekspor non migas - Menurunnya impor produk konsumsi - Menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar - Terwujudnya sistem distribusi yang efektif dan efisien 		

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dimaksudkan agar rencana pengembangan yang terkait dengan periindustrian dan perdagangan dapat selaras dengan RTRW dan KLHS. Telaahan terhadap dokumen RTRW dan

KLHS bermaksud mengurangi risiko terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya pembangunan. Dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dan KLHS dengan rencana pembangunan daerah maka pembangunan daerah dapat menjadi rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

3.4.1. Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengembangan kawasan peruntukan perindustrian

Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengembangan kawasan peruntukan perindustrian terdiri dari :

- kawasan peruntukan industri besar.
- kawasan peruntukan industri sedang/menengah.
- kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga.
- kawasan industri.

1. Kawasan peruntukan industri besar terdapat di: Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Gubug, Kecamatan Tanggunharjo, Kecamatan Godong, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Wirosari dan Kecamatan Pulokulon.
2. Kawasan peruntukan industri sedang/menengah terdapat di: Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Gubug, Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Godong, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Toroh, Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari dan Kecamatan Pulokulon.
3. Kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga tersebar di seluruh kecamatan.

4. Kawasan industri terdapat di Kecamatan Tanggunharjo.

Pengembangan kegiatan industri besar, industri sedang / menengah dan industri kecil / rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas diarahkan pada kawasan :

1. Kawasan peruntukan industri besar dapat dikembangkan di sepanjang jalan provinsi / kolektor primer dengan mekanisme penyelenggaraan ruang tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Kawasan peruntukan industri sedang/menengah dapat dikembangkan di sepanjang jalan provinsi / kolektor primer dengan mekanisme penyelenggaraan ruang tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

3.4.2. Telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup

Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada **sector industry** adalah kurang berkembangnya sentra-sentra industri daerah dengan nilai bobot tertinggi di samping isu pembangunan industri lain sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas SDM terkait dengan perindustrian
2. Masih rendahnya daya saing produk industri local
3. Rendahnya kualitas SDM terkait dengan perindustrian
4. Terbatasnya akses industri kecil dan menengah terhadap permodalan
5. Masih rendahnya kapasitas iptek system produksi

6. Masih banyaknya industry kecil dan menengah yang belum mempunyai ijin usaha
7. Belum optimalnya industri penunjang bagi industry kecil dan menengah.

Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada **sector energy dan sumberdaya mineral** adalah masih terdapatnya usaha pertambangan tanpa ijin yang bersifat eksploitatif (PETI) dan merusak kelestarian lingkungan dan sumber mata air alami dengan nilai bobot tertinggi di samping isu pembangunan energy dan sumberdaya mineral lain sebagai berikut:

1. Belum akuratnya data potensi geologi dan belum adanya data mitigasi bencana geologi, sarana dan prasarana, dan pengawasan mitigasi bencana geologi
2. Kurang optimalnya pengelolaan sumber daya mineral terkait pertambangan
3. Belum optimalnya pengelolaan potensi mineral dan migas oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Grobogan

Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada **sector perdagangan** adalah Meningkatnya jumlah PKL dan asongan yang mengganggu ketertiban di jalan raya (JI R.Suprpto) dengan nilai bobot tertinggi di samping isu pembangunan perdagangan lain sebagai berikut:

1. Berlakunya AFTA 2010 yang mempengaruhi persaingan produk-produk perdagangan

2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan
3. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen terkait produk kadaluwarso
4. Munculnya masalah social sebagai akibat dari banyaknya pasar swalayan/modern
5. Masih terbatasnya volume dan nilai realisasi ekspor
6. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan produk makanan yang kadaluwarso
7. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau
8. Tingginya biaya ekonomi sebagai akibat dari masih rendahnya infrastruktur penunjang yang telah menyebabkan turunnya daya saing produk

KLHS Kabupaten Grobogan adalah upaya untuk menjamin program pembangunan yang dicanangkan di RPJMD Kabupaten Grobogan menjadi berkelanjutan. Tema KLHS mengakomodasi isu pembangunan berkelanjutan sesuai Undang-undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 antara lain: 1) Perubahan iklim; 2) Degradasi SDA & keanekaragaman hayati; 3) Peningkatan intensitas & cakupan wilayah bencana; 4) Peningkatan alih fungsi lahan; 5) Peningkatan penduduk miskin; 6) dan Peningkatan resiko terhadap kesehatan & keselamatan manusia.

Selain mengacu undang-undang tersebut KLHS juga memandang isu strategis RPJMD yaitu: 1) Rendahnya kualitas pembangunan manusia; 2) Pertumbuhan ekonomi melemah; 3) Tingginya tingkat kesenjangan antar kelompok pendapatan masyarakat; 4) Rendahnya capaian pembangunan dan pemberdayaan gender; 5) Tingginya angka kemiskinan; 6) Belum

optimalnyapemerataan mutu dan akses pendidikan; 7) Belum optimalnyakualitas pelayanan kesehatan; 8) Belum optimalnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum; 9) Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan; 10) Rendahnya ketahanan pangan; 11) Rendahnya Investasi

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan isu strategis RPJMD maka dapat disusun isu pembangunan berkelanjutan KLHS RPJMD adalah: 1) Tata ruang dan pemerataan pembangunan; 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau, 3) Kemiskinan dan permukiman tidak layak huni, 4) Permasalahan air bersih, sanitasi, persampahan dan pencemaran lingkungan, 5) Penyediaan transportasi berkelanjutan, 6) Pengelolaan bencana dan perubahan iklim, 7) Perekonomian kota berbasis industri kreatif, pariwisata-budaya, 8) Pendidikan, kesehatan, kesetaraan perempuan, perlindungan anak, lansia, penyandang disabilitas.

Implikasi bagi pengembangan industri dan perdagangan adalah: pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan yang merata di wilayah Kabupaten Grobogan, pengembangan perindustrian yang memperhatikan pencemaran lingkungan dan persampahan agar industri yang dikembangkan ramah lingkungan, pengembangan industri harus memperhatikan sanitasi dan penyediaan air bersih, dan pengembangan industri mendukung upaya pengembangan Kabupaten Grobogan yang ingin industri kreatifnya berkembang sesuai visi Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021.

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dimaksudkan agar rencana pengembangan yang terkait dengan perindustrian dan perdagangan

dapat selaras dengan RTRW dan KLHS. Telaahan terhadap dokumen RTRW dan KLHS bermaksud mengurangi risiko terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya pembangunan. Dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dan KLHS dengan rencana pembangunan daerah maka pembangunan daerah dapat menjadi rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

	Nama Program Dinas	Dampak terhadap lingkungan	Langkah Mitigasi/Pengurangan Dampak
1	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pelaksanaan program berdampak negatif jika pengembangan produk unggulan memanfaatkan SDA yang berlebihan	Pemanfatan SDA agar dibatasi dan penetapan lokasi dengan kajian yang dilandasi peraturan yang tegas serta menyediakan system pengolahan limbah yang baik. Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
2	Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Pelaksanaan program berdampak negatif jika pengembangan produk unggulan memanfaatkan SDA yang berlebihan	Pemanfatan SDA agar dibatasi dan penetapan lokasi dengan kajian yang dilandasi peraturan yang tegas serta menyediakan sistem pengolahan limbah yang baik dan pelengkapan dokumen lingkungan. Memperhatikan Daya Dukung dan Daya

			Tampung Lingkungan.
--	--	--	---------------------

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian serta Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Berdasarkan kajian kondisi dan situasi dan potensi, berikut ini isu strategis dalam Perindustrian dan Perdagangan, yaitu:

1. Belum optimalnya pengawasan terhadap barang yang beredar di masyarakat.
2. Terbatasnya produk lokal yang dapat diterima di pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pembinaan sarana perdagangan yang ada.
4. Belum optimalnya upaya penataan dan pembinaan pedagang kakilima dan asongan.
5. Rendahnya produktifitas industri IKM baik kuantitas maupun kualitas produk yang dihasilkan.
6. Belum tersedianya penataan kawasan industri.

7. Belum tersedianya Sistem informasi industri sebagai pendukung pengembangan industri.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan misi 3 (tiga) RPJMD tahun 2016 – 2021 yaitu Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata maka tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkatoran, SDM, sarana prasarana dan kualitas laporan kinerja

Dalam memberikan pelayanan administrative merupakan faktor pokok di lingkungan Dinas, yang mencakup penyelenggaraan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur
- Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Meningkatkan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2. Menumbuhkembangkan usaha ekonomi kerakyatan baik koperasi dan UMKM, industri, maupun perdagangan

Pembangunan di sektor industri merupakan prioritas utama pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Kontribusi sektor industri dalam perekonomian merupakan kinerja utama pembangunan di sektor industri. Peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian Kabupaten Grobogan memberikan sumbangan PDRB Kabupaten Grobogan. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri perlu adanya peningkatan mutu di industri besar pada umumnya dan industri kecil menengah pada khususnya

Untuk mewujudkan industri yang tertata dan berbasis ekonomi kerakyatan diperlukan sentra-sentra industri di beberapa produk IKM.

Sejalan kemajuan teknologi Sistem informasi nasional merupakan kebutuhan yang sangat penting dan merupakan jejaring bagi perusahaan industri besar/ sedang dan IKM dalam menuju pasar bebas.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Peningkatan SDM IKM
- Meningkatnya jumlah dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)
- Meningkatnya perkembangan dan kontribusi perindustrian dalam perekonomian daerah
- Meningkatkan wasdal pengembangan ESDM

Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum untuk melindungi hak konsumen. Perlindungan konsumen ini perlu agar masyarakat terhindar dari bahan- bahan yang berbahaya untuk

dikonsumsi. Perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajiban serta meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha dalam melakukan usaha perdagangan barang dan jasa.

Kegiatan ekspor dan impor dapat mempengaruhi neraca perdagangan Kabupaten Grobogan. Keseimbangan yang positif dikenal sebagai surplus perdagangan jika terdiri dari ekspor lebih besar dari impor begitupun sebaliknya, Jika nilai ekspor lebih kecil dibandingkan nilai impor maka keseimbangan akan negatif. Keadaan tersebut dikenal sebagai defisit perdagangan

Pendapatan Retribusi pasar atau pendapatan retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Grobogan menuju masyarakat lebih yang sejahtera, perlu adanya dukungan sarana prasarana yang memadai dan sesuai kebutuhan

Pedagang Kaki Lima timbul sebagai akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi, bisa juga sebagai akibat dari kebijakan ekonomi liberal yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi makro dan mengabaikan ekonomi mikro.

Aktivitas PKL pada umumnya menempati badan-badan jalan dan trotoar, sehingga tidak menyisakan cukup ruang bagi pejalan kaki. Kondisi ini menjadi perhatian publik karena menciptakan masalah kemacetan dan pergerakan orang di pedestrian, dan menciptakan lingkungan kotor dan kurang sehat. PKL yang menempati ruang dan jalan publik juga dapat

menciptakan masalah sosial seperti hadirnya pencopet, pencuri, dan sebagainya. Situasi ini menciptakan masalah dalam pengelolaan pembangunan dan merusak morfologi dan estetika kota.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta kinerja sektor perdagangan
- Meningkatkan Perlindungan konsumen.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah, disajikan dalam tabel 4.

Tabel 4.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, SDM, sarana prasarana dan kualitas laporan kinerja	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedia dan terpeliharanya fasilitas sarana dan prasarana aparatur	%	75	80	85	90	95	100
		Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur	Meningkatnya sumberdaya aparatur	%	75	80	85	90	95	100
		Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	bulan	75	80	85	90	95	100
		Meningkatkan kualitas pelaporan capaian kinerja	Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	bulan	12	12	12	12	12	12

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
		dan keuangan								
2	Menumbuhkembangkan usaha ekonomi kerakyatan baik koperasi dan UMKM, industri, maupun perdagangan	Peningkatan SDM IKM	Cakupan Pembinaan unit usaha	%	1,25	1,5	1,7	1,9	20	2,1
			Persentase industry yang telah memenuhi standart kelayakan produksi	%	79,4	82,35	88,23	88,23	94,12	94,12
		Meningkatnya jumlah dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pertumbuhan Industri	%	1,28	1,29	1,30	1,32	1,33	1,35
			Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	2,90	3,10	3,30	3,35	3,40	3,46
			Persentase industry kecil dan menengah	%	99,96	99,96	99,96	99,96	99,97	99,97

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0,14	0,16	0,18	0,19	0,19	0,21
			Persentase sentra industry yang berkembang	%	85,04	85,77	86,86	87,59	88,69	94,42
		Meningkatnya perkembangan dan kontribusi perindustrian dalam perekonomian daerah	Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM	%	16,02	16,33	16,45	16,56	16,59	16,75
		Meningkatkan wasdal pengembangan ESDM	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	84,99	85,50	86,04	86,05	87,05	87,54
			Pertambangan tanpa ijin	%	51,89	50,25	49,45	47,78	46,13	42,85
			Kontribusi sector pertambangan terhadap PDRB	%	1,26	1,32	1,36	1,47	1,59	1,67

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta kinerja sektor perdagangan	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	43,75	44	50	56,25	62,5	68
			Perkembangan nilai ekspor	Rp	142.387.400.000	142.742.480.000	143.456.193.000	144.173.475.000	144.894.341.000	145.618.813.000
			Persentase lokasi PKL yang tertata	%	11,5	12,5	25	30	45	50
			Jumlah Pasar daerah	unit	16	16	16	16	16	16
			Kontribusi sector Perdagangan terhadap PDRB	%	21	21,5	22,35	22,55	23,12	23,65
			Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	%	15	16	20	24	28	30
			Persentase Pasar	%	15,55	15,64	15,75	15,80	16,00	16,50

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
			yang diawasi							
			Tingkat Pengaduan yang ditangani	%	78	80	85	87	90	95
			Produk yang bisa diterima pasar internasional	produk	3	3	3	4	4	4
			Prosentase UTTP yang di tera dan tera ulang	%	25	30	35	40	45	50
			Persentase pertumbuhan toko modern	%	4,1	4	3,9	3,8	3,7	3,6

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan yang ditempuh dalam lima tahun mendatang, sebagaimana, yang disajikan dalam tabel 5.

Tabel 5.
Tujuan,Sasaran,Strategi,danKebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkatoran, SDM, sarana prasarana dan kualitas laporan kinerja	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur sebagai penunjang pelayanan prima kepada masyarakat.
		Peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur	Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur	Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi melalui pelatihan dan tertib administrasi dan kearsipan, serta penyediaan data yang berkualitas dan akuntabel

		Peningkatan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan pembangunan pertanian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta	Meningkatkan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta ketepatan waktu pelaporan
2	Menumbuhkembangkan usaha ekonomi kerakyatan baik koperasi dan UMKM, industri, maupun perdagangan	Peningkatan SDM IKM	Meningkatkan kapasitas SDM tentang desain, inovasi produk	Pengembangan Sistem Inovasi teknologi Industri.
				Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi
				Meningkatkan sarana prasarana layanan teknis dan mesin.
		Meningkatkan jaringan pengendalian mutu dan sertifikasi pada industry kreatif		
		Meningkatnya jumlah dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Meningkatkan pemasaran dan pengembangan jaringan pemasaran produk IKM	Penguatan kelembagaan IKM

				Peningkatan kuantitas dan kualitas produk Industri
				Tertatanya kawasan Industri
			Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pemasaran produk IKM	Optimalisasi sistem informasi industri nasional, pemanfaatan website dan media sosial
		Meningkatnya perkembangan dan kontribusi perindustrian dalam perekonomian daerah	Peningkatan nilai tambah produk IKM	Meningkatkan Pemanfaatan bahan baku lokal
			Peningkatan Investasi Industri	Pengembangan Industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan
			Peningkatan ijin usaha IKM	Peningkatan kualitas dan penyederhanaan perijinan
		Meningkatkan wasdal pengembangan ESDM	Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin	Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan
			Pengembangan energy terbarukan	Peningkatan pemakaian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

		Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta kinerja sektor perdagangan	Meningkatkan perlindungan konsumen melalui pengukuran dan pengawasan pada alat ukur, pengawasan peredaran barang yang dikonsumsi	Peningkatan perlindungan hak-hak konsumen sesuai kuantitas barang
				Peningkatan pengawasan terhadap barang yang beredar di masyarakat
			Meningkatkan volume dan nilai realisasi ekspor	Meningkatkan daya saing produk dalam hal mutu, desain dan merk dagang produk lokal, dan memperkuat jaringan eksportir
			Peningkatan pasar yang memenuhi persyaratan melalui penyediaan sarana pendukung	Optimalisasi tingkat pembinaan dan pengelolaan pasar tradisional yang memadai
				Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional.

				Optimalisasi ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau
				Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perdagangan
			Meningkatkan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan melalui sosialisasi dan penataan tempat berusaha pedagang kaki lima dan asongan	Peningkatan penataan pedagang kaki lima dan asongan
			Pengendalian pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan/ pasar modern melalui penegakkan hukum dan pengawasan perijinan toko swalayan	Pengendalian pertumbuhan toko swalayan/ pasar modern

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana atau masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai berikut :

6.1. URUSAN PERINDUSTRIAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini ditujukan untuk meningkatkan dukungan operasional / pelaksanaan tata usaha, aktivitas perkantoran dan kinerja kantor, Sehingga ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor.

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- Penyediaan Makanan dan Minuman.
- Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
- Rapat - Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah.
- Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi
- Pengelolaan Arsip kantor.
- Evaluasi dan Monitoring pendapatan retribusi pasar.
- Pendataan Potensi Retribusi PAD Pasar Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini ditujukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kenyamanan dalam bekerja, Sehingga ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pembangunan gedung kantor.
- Pengadaan kendaraan dinas/ operasional.
- Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor.
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
- Pengadaan Mebeleur.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Pasar Daerah
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan Perijinannya.

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
- Pemeliharaan rutin/ berkala mebeler.
- Rehabilitasi papan nama pasar daerah.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan disiplin Sumber Daya Manusia, Sehingga ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas Sumber Daya Manusia, Sehingga ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pendidikan dan Pelatihan Non Formal.
- Pengembangan SDM IKM dan Pegawai.
- Bintek Penatausahaan Keuangan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban capaian kinerja dan keuangan OPD, Sehingga ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pengelolaan Aset.
- Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.

6. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

Program ini ditujukan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memproduksi produk-produk IKM, Sehingga ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lokasi Hasil Tembakau Melalui Pelatihan dan Pengembangan Industri Kecil
- Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lokasi Hasil Tembakau Melalui Pelatihan Mebel
- Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lokasi Hasil Tembakau Melalui Pelatihan Makanan Olahan Berbahan Baku Lokal
- Pelatihan dan Pengembangan Industri Genteng
- Pelatihan dan Pengembangan Loster/ Batu Bata
- Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi

7. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah (IKM)

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kinerja dan sistem informasi bagi pelaku dunia usaha sehingga dapat meraih pangsa pasar, Sehingga ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Daerah (RPIDA).

- Fasilitasi Promosi Produk Industri dan Kerajinan Unggulan Kabupaten Grobogan.
- Pembinaan Industri kecil P2MBG.
- Pelatihan dan Pengembangan Kerajinan tenun.
- Pelatihan Kewirausahaan.
- Peningkatan Ketrampilan Industri Kecil Logam.
- Update Data Base Industri Kecil Kab.Grobogan.
- Pelatihan Manajemen Usaha Industri Kecil.
- Peningkatan Capacity building IKM / aparat.
- Pelatihan dan Pengembangan Industri Minuman Kesehatan.
- Pembinaan dan Monitoring Kelompok Usaha Bersama / IKM Kab.Grobogan.
- Grobogan Expo
- Fasilitasi dan Pengembangan Kerajinan Daerah
- Pelatihan Pengembangan Desain Motif dan Pewarna Batik
- Penyusunan Motif Desain Batik
- Fasilitasi dan Magang Kerja Industri
- Pengembangan dan Pelatihan Peningkatan Ketrampilan di Bidang Agro Industri
- Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kerajinan Batik Grobogan
- Pengembangan dan Pelatihan Peningkatan Ketrampilan di bidang Non Agro Industri
- Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan swasta
- Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfatana Sumber Daya

- Penataan Kelompok Industri Kecil Kabupaten Grobogan
- Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lokasi Hasil Tembakau Melalui Pelatihan Makanan Olahan Industri Rumah Tangga
- Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lokasi Hasil Tembakau Melalui Pelatihan Kerajinan Berbahan Baku Kulit
- Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lokasi Hasil Tembakau Melalui Pelatihan Produksi Kerajinan
- Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lokasi Hasil Tembakau Melalui Pelatihan Kerajinan Furniture Kayu
- Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lokasi Hasil Tembakau Melalui Pelatihan Teknologi Produksi Batik Tulis
- Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri
- Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah
- Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
- Pembinaan Tenaga/Aparat Industri Kecil dan Menengah
- Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah
- Fasilitasi Pemasaran Hasil Industri Kecil Dan Menengah
- Fasilitasi Hasil Industri Kecil Dan Menengah Unggulan Daerah
- Pelatihan dan fasilitasi pembuatan kemasan produk industri kecil dan menengah (DBHCHT)
- Pelatihan Keterampilan pembuatan kain tenun (DBHCHT)

- Pelatihan membuat bagi pemuda pemudi putus sekolah dan pengangguran (DBHCHT)
- Pelatihan pembuatan kerajinan dan souvenir dalam rangka pengembangan industri kreatif (DBHCHT)
- Pelatihan pembuatan tas dari bahan rajut (DBHCHT)
- Pelatihan peningkatan kompetensi bagi IKM Logam (DBHCHT)
- Pelatihan teknisi HP (DBHCHT)
- Pembinaan/Pelatihan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi calon wirausaha baru (DBHCHT)
- Pembinaan/pelatihan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi Industri Kecil Menengah (DBHCHT)
- Pembinaan/pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)
- Pembinaan/pelatihan pembuatan anyaman bambu (DBHCHT)
- Pembinaan/pelatihan manajemen kewirausahaan (DBHCHT)
- Sosialisasi PIRT dan Fasilitasi PIRT (DBHCHT)
- Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (DBHCHT)
- Study Terap Industri Kecil dan Menengah
- Fasilitasi Legalitas Kelembagaan, Sertifikasi dan PIRT Bagi Kelompok Industri Kecil Menengah
- Pelatihan Siap Kerja Bagi Masyarakat dalam Rangka Mengurangi Pengangguran
- Penguatan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Industri Kecil Menengah (IKM)

8. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk produk IKM, Sehingga ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pelatihan Makanan Olahan Industri Rumah Tangga
- Pelatihan Desain Kemasan Produk Industri
- Pelatihan Kerajinan Berbahan Baku Kulit.
- Pelatihan dan Pengembangan Mebel
- Pelatihan Kerajinan Ukir.
- Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
- Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

9. Program Penataan Struktur Industri

Program ini ditujukan untuk meningkatkan omzet penjualan produk produk IKM, Sehingga ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Monitoring Pengembangan Industri Kabupaten Grobogan
- Fasilitasi Sektor Industri dan ESDM
- Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga Ke Hilir
- Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

10. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas / kemampuan sentra industry kecil, Sehingga ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Penguatan Sentra Sentra Industri Potensial Kabupaten Grobogan .
- Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Sentra Industri

6.2. URUSAN PERDAGANGAN

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pengasawan, pembinaan, dalam rangka perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan terhadap produk-produk yang tidak sesuai ketentuan, Sehingga ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen.
- Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Permasalahan Pengaduan Konsumen
- Monitoring Distribusi Barang Strategis/ Barang Dalam Pengawasan
- Fasilitasi Pelaksanaan Sidang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).
- Operasional dan Pengembangan Kemetrolagian Daerah
- Pelayanan Kemetrolagian Daerah
- Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
- Fasilitasi Kegiatan Pengamanan Perdagangan
- Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
- Sosialisasi Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

2. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Intrnasional

Program ini ditujukan untuk meningkatkan hubungan kerjasama perdagangan secara luas agar barang/produk bisa diterima secara internasional, sehingga ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Data Base kuota setiap jenis barang dan jasa
- Peyebarluasan Data base kuota setiap jenis barang dan jasa

- Fasilitasi Penyelenggaraan temu usaha produsen dengan mitra usaha luar negeri

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan promosi kepada pengusaha / produsen, Sehingga ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Dalam Negeri.
- Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen Ekspor dan Impor.
- Pengembangan data base informasi potensi unggulan.
- Koordinasi Program Pengembangan Ekspor Dengan Instansi Terkait/Asosiasi/Pengusaha

4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan bahan bahan kebutuhan pokok masyarakat agar tidak terjadi kelangkaan barang kebutuhan pokok di pasaran serta meningkatkan infrastruktur pasar daerah, Sehingga ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan Operasional.
- Penyempurnaan Perda No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
- Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha.
- Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang.

- Pelayanan Informasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas).
- Penyusunan Database bidang Perdagangan berbasis Gender
- Penyediaan papan informasi harga “running teks” di pasar daerah
- Koordinasi Lintas Sektor dalam penanggulangan ketersediaan barang pada hari besar
- Operasi Pasar
- Pameran Dalam Daerah dan Regional
- Pameran berskala nasional
- Monitoring perdagangan kayu dan perdagangan antar pulau
- Penerbitan surat perjanjian dan SK Penempatan Pada Pasar Daerah.
- Relokasi Pedagang dan Peresmian Pasar Daerah
- Penyusunan Perencanaan Teknis/ Review DED Pembangunan Kantor/ Pasar Daerah
- Pembangunan/ penataan Fasilitas Sarana dan prasarana Pasar Daerah
- Pembangunan/ Revitalisasi Pasar / Penataan Pasar Daerah/ Rakyat
- Penunangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Sarana Perdagangan (Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Daerah/ Rakyat) / Penunangan TP
- Pendampingan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Sarana Perdagangan (Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Daerah/ Rakyat) / Pendampingan TP
- Sosialisasi Pasar Daerah
- Pembuatan Lapak Darurat Pasar Daerah

- Validasi Data Toko Modern
- Pendataan Pedagang Pasar Daerah
- Pemetaan atau Zonasi Produk Dagangan Pedagang Pasar Daerah
- Pembinaan Pedagang di Lingkungan Pasar Daerah
- Pemeliharaan aplikasi sistem pendapatan retribusi Pasar daerah
- Pembangunan Pusat Kuliner di Tanah Ex PT. KAI
- penunangan pembangunan pusat kuliner di Tanah ex PT KAI.
- Pengurangan Perluasan Pasar Daerah
- Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang
- Fasilitasi dan Sarana Penunjang Dalam Kerangka Sistem Resi Gudang (Sisa DAK 2015)
- Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
- Penyusunan Data Base Perdagangan
- Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
- Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalamnegeri
- Fasilitasi Pemasaran Produk Dagang
- Pembangunan Sarana Prasarana Produk Dagang
- Fasilitasi Pendataan Produk Dagang
- Penyelenggaraan Pemasaran Produk
- Fasilitasi Kebijakan Pedagang Pasar
- Pembinaan Pedagang Pasar
- Fasilitasi Pengembangan Pasar Daerah
- Penataan Sarana Prasarana Pasar Daerah
- Fasilitasi Dan Pendataan Pedagang Dan Produk Dagang Pasar
- Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan

5. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tercipta tata kota yang bersih dan nyaman, Sehingga ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima .
- Penataan Tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima
- Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima Dan Asongan.
- Fasilitasi Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan
- Pembangunan Tempat Sarana Dagang
- Pengadaan Sarana Prasarana Dagang Pedagang Kaki Lima Dan Asongan
- Fasilitasi Pengolahan, Pengembangan Jaringan Dan Promosi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Selanjutnya Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun 2016 -2021, dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kab.Grobogan
Provinsi Jawa Tengah**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
							Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
							2015	2016	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta kinerja sektor perdagangan					1. Persentase pasar yang memenuhi persyaratan 2. Perkembangan nilai ekspor																
	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana serta kinerja sektor perdagangan	1.Persentase pasar yang memenuhi 2.Perkembangan nilai ekspor		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Pasar Yang diawasi Tingkat Pengaduan Yang ditangani	% %	15,17 75	15,55 78	15,64 80	217.863.793	15,75 85	236.449.271	15,80 87	257.207.628	16,00 90	273.056.689	16,50 95	306.549.064	16,50 95	Disperindagtaban Kab. Grobogan	
		3.Persentase lokasi PKL yang tertata		Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Capaian sengketa konsumen	buah	6	12	12	40.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	60	230.000.000	Disperindagtaban

							Perkembangan Nilai Impor	Rp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
							Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	20,06	21,00	21,50	22,35	22,55	23,12	23,65								
							Pengembangan Informasi Reluang Pasar Perdagangan Dalam Negeri	KUB	-	-	50	50.000.000	50	55.000.000	50	55.000.000	50	60.000.000	50	60.000.000	250	280.000.000	Disperindagtan
							Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen Ekspor dan Impor	perusahaan	-	-	50	40.000.000	50	40.000.000	50	45.000.000			50	50.000.000	200	175.000.000	Disperindagtan
							Pengembangan data base informasi potensi unggulan	Komoditi/usaha	-	-	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000	500	260.000.000	Disperindagtan
							Koordinasi Program Pengembangan Ekspor Dengan Instansi Terkait/Asosiasi/Bangusaha	produk						3	75.000.000				3	75.000.000	6	150.000.000	
							Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	%	12,5	15	16	13.315.883.243	20	14.451.831.782	24	15.720.587.103	28	16.689.285.219	30	18.736.346.640	30		Disperindagtan Kab. Grobogan

					Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan Operasional	Jumlah Perda, Perbub	Perda Perbub	-	-	1	50.000.000	1	100.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	5	385.000.000	Disperin dagtamb en
					Penyempurnaan Perda No 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah	perda	-	-	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.000.000	Disperin dagtamb en
					Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Jumlah UKM yang difasilitasi	UKM	-	-	300	50.000.000	300	50.000.000	300	55.000.000	300	55.000.000	300	60.000.000	1.500	270.000.000	Disperin dagtamb en
					Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk	Jumlah penyimpanan hasil panen	kg	-	-	400.000	80.000.000	400.000	105.000.000	400.000	105.000.000	400.000	110.000.000	400.000	110.000.000	2.000.000	510.000.000	Disperin dagtamb en
					Pelayanan Informasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas)	Jumlah penyajian laporan perkembangan harga Kepokmas	bulan	12	12	12	40.000.000	12	50.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	60	210.000.000	Disperin dagtamb en

					Penyusunan data base bidang Perdagangan berbasis gender	Jumlah penyajian data bidang perdagangan	data base	0	0	0	-	7	15.000.000	0	0	0	0	0	0	7	15.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan
					Penyediaan papan infirmasi harga kepokmas (running teks) di pasar daerah	Jumlah running teks	unit	0	0	0	0	5	175.000.000	0	0	0	0	0	0	5	175.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan
					koordinasi lintas sektor ketersediaan barang pada hari hari besar	Jumlah pelaksanaan penanggulangan ketersediaan barang saat hari besar	kali	0	0	0	0	2	40.000.000	0	0	0	0	0	0	2	40.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan
					Operasi pasar	Jumlah lokasi Operasi Pasar	Kecamatan	0	0	0	0	19	100.000.000	19	100.000.000	19	100.000.000	19	100.000.000	76	400.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan

					Pameran dalam daerah dan regional	Jumlah pameran daerah dan pameran regional	kali	0	0	0	0	3	100.000.000							3	100.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan	
					Pameran berskala nasional	Jumlah event yang diikuti	event	0	0	0	0	1	200.000.000								1	200.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan
					Monitoring perdagangan kayu dan perdagangan antar pulau	Jumlah lokasi monitoring	Kecamatan	0	0	0	0	19	100.000.000	19	100.000.000	19	100.000.000	19	25000000	76	325.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan	
					Penerbitan Surat SK Penempatan Pada Pasar Daerah	Jumlah lokasi Penbitan dan Pembaharuan SK	Pasar Daerah	13	13	13	75.000.000	13	75.000.000	0	0	0	0	0	0	26	150.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan	
					Relokasi Pedagang dan Peresmian Pasar Daerah/ Kuliner	Jumlah pasar yang direlokasi dan diresmikan	Pasar Daerah	1	1	2	600.000.000	5	500.000.000	0	0	0	0	0	0	7	1.100.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan	

						Penyusunan perencanaan Teknis/ Review DED Pembangunan Kantor/ Pasar Daerah	Jumlah DED / Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor/ Pasar Daerah	Paket	0	7	8	300.000.000	8	300.000.000	0	0	0	0	0	16	600.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an		
						Pembangunan/ penataan Fasilitas Sarana dan prasarana Pasar Daerah	Jumlah pembangunan dan penataan Fasilitas Sarana dan prasarana pasar daerah	Pasar Daerah	7	4	6	1.000.000.000	7	10.000.000.000							13	11.000.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an	
						Pembangunan/ Revitalisasi/ Penataan Pasar Daerah / Rakyat	Jumlah Revitalisasi/ Pembangunan Pasar Daerah	Pasar Daerah	6	4	5	18.000.000.000	5	10.000.000.000								10	28.000.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an
						Penunangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Sarana Perdagangan (Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Daerah/ Rakyat) dan Penunangan TP	Jumlah lokasi penerima DAK dan TP	Pasar Daerah	3	3	1	100.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	13	1.300.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an	

					Pemeliharaan aplikasi sistem pendapatan retribusi Pasar daerah	Jumlah aplikasi sistem pendapatan retribusi pasar daerah	unit		13	0	0	0	13	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	13	10.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an	
					Pembangunan Pusat Kuliner di Tnah Ex PT. KAI	Jumlah pusat Kuliner	unit		0	0	1	4.250.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1	4.250.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an	
					penunngan pembangunan pusat kuliner di Tanah ex PT KAI.	Jumlah pusat Kuliner	unit		0	0	1	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1	200.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an	
					Sosialisasi Pasar Daerah	Jumlah Pedagang Pasar dan lingkungan sekitarnya	org		0	3	150	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	40.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an	
					Pembuatan Lapak Darurat Pedagang Pasar Daerah	Jumlah Lapak Darurat yang disediakan	unit		0	2	2	500.000.000	3	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5	1.200.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an	
					Validasi data Toko Modern	Dokumen data toko moder	buku		0	0	1	40.000.000	0	0	1	40.000.000	0	0	1	40.000.000	0	3	120.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an	
					Pengurangan Perluasan Pasar Daerah	Jumlah Pasar Daerah yang urug	unit		0	0	1	200.000.000	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	200.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an	
					Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG)	Jumlah sarana/ prasarana SRG	kg		760000	250.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an
					Fasilitasi dan Sarana Penunjang Dalam Kerangka Sistem Resi Gudang (Sisa DAK 2015)	Jumlah sarana/ prasarana SRG	m2				264	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	600.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an	
					Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Jumlah lapak Darurat yang disediakan	unit								4	900.000.000	5	500.000.000		3	700.000.000	12	2.100.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an	

					Fasilitasi Kebijakan Pedagang Pasar	Pedagang Pasar Daerah							13	75.000.000		13	75.000.000		13	75.000.000		39	225.000.000	
					Pembinaan Pedagang Pasar	Pedagang Pasar Daerah	orang						1000	1.700.000.000		1000	1.300.000.000		1000	1.300.000.000		3.000	4.300.000.000	
					Fasilitasi Pengembangan Pasar Daerah	DED Pembangunan Pasar Daerah							8	300.000.000		8	300.000.000		8	300.000.000		24	900.000.000	
					Penataan Sarana Prasarana Pasar Daerah								12	23.200.000.000		12	25.200.000.000		12	27.200.000.000		36	75.600.000.000	
					Fasilitasi Dan Pendataan Pedagang Dan Produk Dagang Pasar								2500	500.000.000		2500	500.000.000		2500	500.000.000		7.500	1.500.000.000	
					Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Tercapainya peningkatan motivasi dan pembinaan pelaku perdagangan										80	180.000.000		80	180.000.000		160	360.000.000	
					Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Asongan	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	10,34	11,5	12,5	2.478.366.756	25	2.689.790.741	30	2.925.932.869	45	3.106.228.023	50	3.487.229.334	50	3.487.229.334	50	3.487.229.334	Disperindagtan Kab. Grobogan
						Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	43,75	43,75	44		50		56,25		62,5		68						

						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	buah	7	7	410	32.500.000	410	30.000.000	410	30.000.000	410	30.000.000	410	30.000.000	2.050	152.500.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah surat kabar dan tabloid	eksempla r	82	72	82	10.500.000	82	9.000.000	82	8.500.000	82	8.500.000	82	9.000.000	410	45.500.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an
						Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan Minuman Karyawan, dan Rapat	ok	1868	1868	1870	64.000.000	1870	65.000.000	1870	60.000.000	1870	60.000.000	1870	60.000.000	9.350	309.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an
						Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat/koordinasi/ konsultasi ke luar daerah (perjalanan dinas ke luar daerah, dalam provinsi/ luar provinsi)	bl	12	12	12	253.000.000	12	215.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	12	230.000.000	60	1.138.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an
						Rapat - Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah	Jumlah rapat/ koordinasi/ konsultasi di dalam daerah	bl	12	12	12	50.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	60	235.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an

						Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi	Jumlah pengadaan alat kebersihan dan gaji tenaga kebersihan , keamanan dan transportasi kantor dan pasar daerah	bl	12	12	12	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.700.000.000	12	1.700.000.000	12	1.700.000.000	60	8.100.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobogan
						Pengelolaan Arsip kantor	Jumlah penataan arsip aktif dan pemusnahan arsip inaktif	bl	0	0	12	12	20.000.000	12	22.000.000	12	22.500.000	12	24.000.000	12	25.000.000	60	113.500.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobogan
						Evaluasi dan Monitoring Pendapatan Retribusi Pasar Daerah	Jumlah Monitoring dan Evaluasi PAD pada Retribusi Pendapatan Pasar Daerah	Pasar Daerah	0	0	18	18	75.000.000	18	75.000.000	18	75.000.000	18	75.000.000	18	75.000.000	90	375.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobogan
						Pendataan Potensi Retribusi PAD Pasar Daerah	Jumlah data potensi Retribusi Pendapatan Pasar Daerah	Pasar Daerah	0	0	18	18	75.000.000	18	75.000.000	18	75.000.000	18	75.000.000	18	75.000.000	90	375.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobogan
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							2.444.000.000		2.288.500.000		17.912.500.000		17.953.500.000		2.917.000.000			Disperin dagtamb en
						Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor	unit	0	0	0	0	0	0	0	1	15.000.000.000	1	15.000.000.000	0	0	2	30.000.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobogan

						Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	unit	2	4	8	144.000.000	6	130.000.000	7	330.000.000	6	320.000.000	5	132.000.000	32	1.056.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an	
						Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	unit	150	39	35	95.000.000	35	150.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	60	250.000.000	230	895.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an	
						Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	unit	49	20	88	100.000.000	40	150.000.000	40	230.000.000	40	252.000.000	40	275.000.000	248	1.007.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an	
						Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	unit	0	24	15	35.000.000	15	38.500.000	15	42.500.000	15	46.500.000	15	50.000.000	75	212.500.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an	
						Pengadaan sarana dan prasarana di Pasar Daerah	Jumlah Pengadaan fasilitas sarana dan prasarana dipasar Daerah	unit		35	25	500	500.000.000	500	500.000.000	500	500.000.000	500	500.000.000	500	500.000.000	2.500	2.500.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor,	Jumlah pemeliharaan	paket	3	2	4	400.000.000	3	40.000.000	3	300.000.000	4	300.000.000	4	350.000.000	18	1.390.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an	

						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Pasar Daerah	Jumlah Pemeliharaan Fisik Pembangunan Pasar Daerah	Pasar Daerah		1	6	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	20	5.000.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan Perijinannya	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	bin	12	12	12	70.000.000	12	75.000.000	12	85.000.000	12	95.000.000	12	100.000.000	60	425.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an	
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	bin	12	12	12	100.000.000	12	140.000.000	12	150.000.000	12	160.000.000	12	170.000.000	60	720.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an	
						Pemeliharaan rutin/ berkala mebel	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala mebel	bin	0	0	12	0	12	15.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	60	80.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an	
						Rehabilitasi papan nama pasar daerah	Jumlah Rehabilitasi papan nama pasar daerah	unit	0	16	0	0	4	50.000.000	4	55.000.000	4	60.000.000	4	65.000.000	16	230.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an	
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur						150.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000		190.000.000			Disperin dagtamb en	
						Pengadaan Pakain Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian olah raga, kedy, batik, lurik	stel	106	103	103	75.000.000	103	80.000.000	103	85.000.000	103	90.000.000	103	95.000.000	515	425.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobog an	

						Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	atel	214	172	172	75.000.000	172	80.000.000	172	85.000.000	172	90.000.000	172	95.000.000	860	425.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						150.000.000		385.000.000		410.000.000		435.000.000		460.000.000			Disperindagtaben
						Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah Bintek/ Diklat	bl	12	12	12	150.000.000	12	70.000.000	12	80.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	60	490.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan
						Pengembangan SDM IKM dan Pegawai	Jumlah SDM IKM dan pegawai	org	0	100	0	-	100	240.000.000	100	250.000.000	100	260.000.000	100	270.000.000	400	1.020.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan
						Bintek Penatausahaan Keuangan	Jumlah SDM pengelola keuangan	org	0	0	0	0	60	75.000.000	60	80.000.000	60	85.000.000	60	90.000.000	240	330.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan

						Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen survei IKM bidang Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Pasar Daerah	buah	0	0	0	0	3	75.000.000	3	77.500.000	3	80.000.000	3	82.500.000	12	315.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan
Meningkatnya jumlah dan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)							1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB																
							2. Pertumbuhan Industri																
	1. Peningkatan SDM IKM	1. Cakupan Pembinaan unit usaha				Program Peningkatan Kapasitas IPTeK Sistem Produksi	Cakupan pembinaan unit Usaha IKM	%	1,2	1,25	1,5	444.619.986	1,7	482.549.534	1,9	524.913.526	2	557.258.548	2,1	625.610.336	2,1	625.610.336	Disperindagtaben Kab. Grobogan
	2. Persentase industry yang telah memenuhi standart kelayakan produksi				Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lokasi Hasil Tembakau Melalui Pelatihan dan Pengembangan Industri Kecil	Jumlah IKM yang dibina	org	0	0	0	0	0	0	20	85.000.000	20	90.000.000	20	100.000.000	60	275.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan	
					Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lokasi Hasil Tembakau Melalui Pelatihan Mebel	Jumlah pengrajin mebel yang dilatih	org	0	0	-	-	-	-	20	85.000.000	20	90.000.000	20	100.000.000	60	225.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan	

						Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lokasi Hasil Tembaku Melalui Pelatihan Makanan Olahan Berbasis Bahan Baku Lokal	Jumlah Pengrajin makanan olahan yang dibina	org	0	0	0	0	0	0	0	20	85.000.000	20	90.000.000	20	100.000.000	60	225.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan
						Pelatihan dan Pengembangan Industri Genteng	Jumlah pengrajin genteng yang dilatih	org	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	60	225.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan
						Pelatihan dan pengembangan Industri Loster/ Batu bata	Jumlah pengrajin Loster/ Batu bata yang dilatih	org	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	60	225.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan
						Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Terlaksananya Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	org							50	170.000.000	50	180.000.000	60	200.000.000	60	225.000.000		
						Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	73,5	79,4	82,35	322.224.597	88,23	349.712.864	88,23	380.414.859	94,12	403.855.914	94,12	453.391.760			225.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan
						Pelatihan Desain kemasan Produk Industri	Jumlah IKM yang dilatih desain kemasan	org	20	0	0	0	0	0	30	70.000.000	30	80.000.000	30	80.000.000	90	230.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan	
						Pelatihan Makanan Olahan Industri Rumah Tangga	Jumlah IKM Makanan Olahan	org	0	0	0	0	0	0	30	80.000.000	30	80.000.000	30	70.000.000	90	230.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan	
						Pelatihan Kerajinan Berbahan Baku Kulit	Jumlah IKM Tas/sepatu	org	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	0	Disperindagtaben Kab. Grobogan
						Pelatihan dan Pengembangan Mebel	Jumlah IKM Mebel	org	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	Disperindagtaben Kab. Grobogan

						Pelatihan Kerajinan Ukir	Jumlah pengrajin Ukir	org	0	0	0	0	0	0	0	25	83.855.914	20	73.391.760	45	157.247.674	Disperin dagtamb en Kab. Grobogan		
						Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Terlaksananya Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	org							60	150.000.000	60	160.000.000	60	150.000.000	180	460.000.000		
						Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Terlaksananya Pelatihan Desain Kemasan Produksi Industri	org									430	430.000.000						
	2. Meningkatkan jumlah dan kapasitas Industri kecil dan Menengah (IKM)	Pertumbuhan Industri				Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah (IKM)	Pertumbuhan Industri	%	1,27	1,28	1,29	896.353.892	1,30	972.819.860	1,32	1.058.225.668	1,33	1.123.433.233	1,35	1.261.230.437	1,35	1.261.230.437	Disperin dagtamb en Kab. Grobogan	
		Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB					Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	2,7	2,9	3,1		3,3		3,35		3,4		3,46					
		Persentase industry kecil dan menengah					Persentase industry kecil dan menengah	%	99,96	99,96	99,96		99,96		99,96		99,97		99,97					
		Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk					Persentase IKM yang telah memiliki ijin usaha	%	57	57,56	57,92		58,33		59,15		59,56		60,25					
		Persentase sentra industry yang berkembang					Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0,02	0,14	0,16		0,18		0,19		0,195		0,21					
						Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat diokasi Hasil tembakau Melalui Pelatihan Makanan Olahan Industri Rumah Tangga	Jumlah IKM Makanan Olahan yang dilatih	org	20	20	22	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22	80.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobogan	
						Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat diokasi Hasil tembakau Melalui Pelatihan Kerajinan Berbahan Baku Kulit		org	20	20	20	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20	80.000.000	Disperin dagtamb en Kab. Grobogan		

						Pengembangan dan Pelatihan Peningkatan ketrampilan di bidang Non Agro Industri	Jumlah IKM Non Agro Industri yang terampil	org	0	0	0	0	20	40.000.000	0	-	35	70.000.000	35	70.000.000	90	180.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan	
						Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kerajinan Batik Grobogan	Jumlah IKM Batik yang dilatih	org	65	40	20	8.000.000	25	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	45	68.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan
						Pengembangan dan Pelatihan Peningkatan ketrampilan di bidang Agro Industri	Jumlah IKM Agro Industri yang terampil	org	0	0	0	0	25	55.000.000	0	-	35	70.000.000	35	70.000.000	95	195.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan	
						Pembinaan dan Monitoring Kelompok Usaha Bersama/ IKM Kab Grobogan	Capaian IKM yang terbina	klpk	0	0	0	0	40	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	40	50.000.000	Disperindagtaben Kab. Grobogan

					Update Data Base Industri Kecil Kab.Grobogan	Jumlah Data base IKM	buku	0	0	10	80.000.000	0	0	0	0	1	70.000.000	1	70.000.000	12	220.000.000	Disperindagtamben Kab. Grobogan
					Peningkatan Capacity Building IKM aparat	Jumlah IKM aparat	org	0	0	0	0	100	150.000.000	0	-	0	-	0	-	100	150.000.000	Disperindagtamben Kab. Grobogan
					Pembinaan Industri Kecil PZMBG	Jumlah IKM lokasi PZMBG yang dibina	org	20	20	20	70.000.000	30	75.000.000	0	-	0	-	0	-	50	145.000.000	Disperindagtamben Kab. Grobogan

Lokasi
21
Kabupaten Grobogan
Kabupaten Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

--

Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan

--

Kabupaten Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten Grobogan
Kabupaten Grobogan
Kabupaten Grobogan
Kabupaten Grobogan
Kabupaten Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupate
n
Grobogan

Kabupaten Grobogan
Kabupaten Grobogan
Kabupaten Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

Kabupaten
Grobogan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang- bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi .

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang sesuai dengan Visi dan Misi, maka disusun indikator kinerja

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7
Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Awal Tahun 2015	Target Kinerja Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Urusan Perdagangan								
	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	43,75	43,75	44	50	56,25	62,5	68
	Perkembangan nilai ekspor	Rp	142.032.319.000	142.387.400.000	142.742.480.000	143.456.193.000	144.173.475.000	144.894.341.000	145.618.813.000
	Persentase Pasar yang diawasi	%	15,57	15,55	15,64	15,75	15,80	16,00	16,50
	Tingkat Pengaduan yang ditangani	%	75	78	80	85	87	90	95
	Produk yang bisa diterima pasar internasional	buah	3	3	3	3	4	4	4

	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Awal Tahun 2015	Target Kinerja Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	20,06	21	21,50	22,35	22,55	23,12	23,65
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	12,5	15	16	20	24	28	30
	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	10,34	11,5	12,5	25	30	45	50
	Urusan Perindustrian								
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	2,7	2,9	3,1	3,3	3,35	3,4	3,46
	Pertumbuhan Industri	%	1,27	1,28	1,29	1,30	1,32	1,33	1,35
	Cakupan pembinaan unit Usaha IKM	%	1,2	1,25	1,5	1,7	1,9	2	2,1
	Persentase industri kecil dan menengah	%	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,97	99,97
	Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0,02	0,14	0,16	0,18	0,19	0,195	0,21

	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian Awal Tahun 2015	Target Kinerja Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	73,5	79,4	82,35	88,23	88,23	94,12	94,12
	Persentase sentra industri yang berkembang	%	83,58	85,04	85,77	86,86	87,59	88,69	89,42
	Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM	%	15,09	16,02	16,33	16,45	16,56	16,59	16,75
	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	84,92	84,99	85,50	86,04	86,50	87,05	87,54
	Pertambangan tanpa ijin	%	53,92	51,89	50,25	49,45	47,78	46,13	42,85
	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	1,21	1,26	1,32	1,36	1,47	1,59	1,67

BAB VIII PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan selama periode 2016 – 2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Grobogan 2016 – 2021.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan merupakan penjabaran dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan, selanjutnya Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Grobogan yang merupakan rencana tahunan selama periode lima tahun, 2016-2021.

Pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Secara substansial Renstra merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholder* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman, arah dan acuan dalam melaksanakan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan, Tahun 2016 - 2021 di Kabupaten Grobogan. Pada akhirnya perencanaan strategis ini akan diukur oleh seberapa jauh program yang akan dilaksanakan dapat dinikmati dan dapat memberikan manfaat kepada seluruh anggota masyarakat.

Program yang telah disusun diharapkan dapat dilaksanakan secara partisipatif menyeluruh dan merata oleh semua lapisan masyarakat sehingga dapat merasakan keberadaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dalam melakukan pembangunan yang dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan, serta pelayanan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Grobogan 2016-2021 ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh”***